



RENCANA STRATEGI 2021 - 2026



REVISI

**PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS KESEHATAN**

Jl. Balai Kota Utara No. 4 Palu Telp. 0451-425140

Website : dinkes.palukota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 telah dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai Tahun 2026. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan/sub kegiatan berupa indikator *output/outcome* kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan Dinas Kesehatan Kota Palu dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Palu..

Palu, 10 Maret 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



dr. Rochmat Jasin Moenawar
Nip. 19691203 200604 1 008

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|-----|
| Kata Pengantar | | i |
| Daftar Isi | | iii |
| Daftar Tabel | | iv |
| Daftar Gambar | | v |
| BAB I PENDAHULUAN | | |
| 1.1 Latar Belakang | | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU | | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | | 10 |
| 2.2 Sumberdaya Dinas Kesehatan | | 21 |
| 2.2.1 SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan | | 21 |
| 2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana Kesehatan | | 23 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan | | 27 |
| 2.3.1 Indikator Makro | | 27 |
| 2.3.2 Indikator Pelayanan | | |
| Urusan Wajib Kesehatan | | 32 |
| 2.3.3 Anggaran Kesehatan | | 35 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan | | 41 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 43 |
| 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota | | 45 |

| | | |
|-----------------|--|----|
| | 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Prop Sulawesi Tengah | 51 |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 53 |
| | 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 54 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN | 55 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU | 58 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 60 |
| BAB VII | INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 72 |
| BAB VIII | PENUTUP | 77 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinkes Kota Palu | 21 |
| Tabel 2.2 | SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu | 22 |
| Tabel 2.3 | Data Kebutuhan & Keadaan SDM Dinas Kesehatan Kota Palu s/d Tahun 2020 | 23 |
| Tabel 2.4 | Sarana & Prasarana Dinas Kesehatan di Kota Palu Tahun 2020 | 23 |
| Tabel 2.5 | Status Gizi Kota Palu Tahun 2016 - 2020 | 31 |
| Tabel 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu | 33 |
| Tabel 2.7 | Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu | 35 |
| Tabel 2.8 | Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan di Kota Palu Tahun 2016 s/d 2020 | 36 |
| Tabel 2.9 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Palu | 37 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kota Palu | 43 |
| Tabel 3.2 | Isu-isu Strategis | 44 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu | 56 |
| Tabel 4.2 | Perubahan Indikator Dinas Kesehatan | 57 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 | 59 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021-2026 | 62 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu | 73 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Alur Penyusunan Renstra | 3 |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu | 20 |
| Gambar 2.2 | SDM di Lingkungan Dinkes Kota Palu berdasarkan Tingkat Pendidikan | 22 |
| Gambar 2.3 | Angka Kematian Bayi/Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 | 28 |
| Gambar 2.4 | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 | 29 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tiga dekade terakhir telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Derajat kesehatan masyarakat telah menunjukkan perbaikan seperti dapat dilihat dari angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan umur harapan hidup.

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 tahapan ke-4 (2020-2024), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat terus meningkat yang ditunjukkan antara lain oleh mantapnya SDM berkualitas dan berdaya saing yang didukung oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terwujudnya kesetaraan gender, serta bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pokok RPJMN Kesehatan 2020-2024 adalah: (1) Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi; (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat; (3) peningkatan pengendalian penyakit; (4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dan (5) peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Palu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari program, dan kegiatan serta faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026.

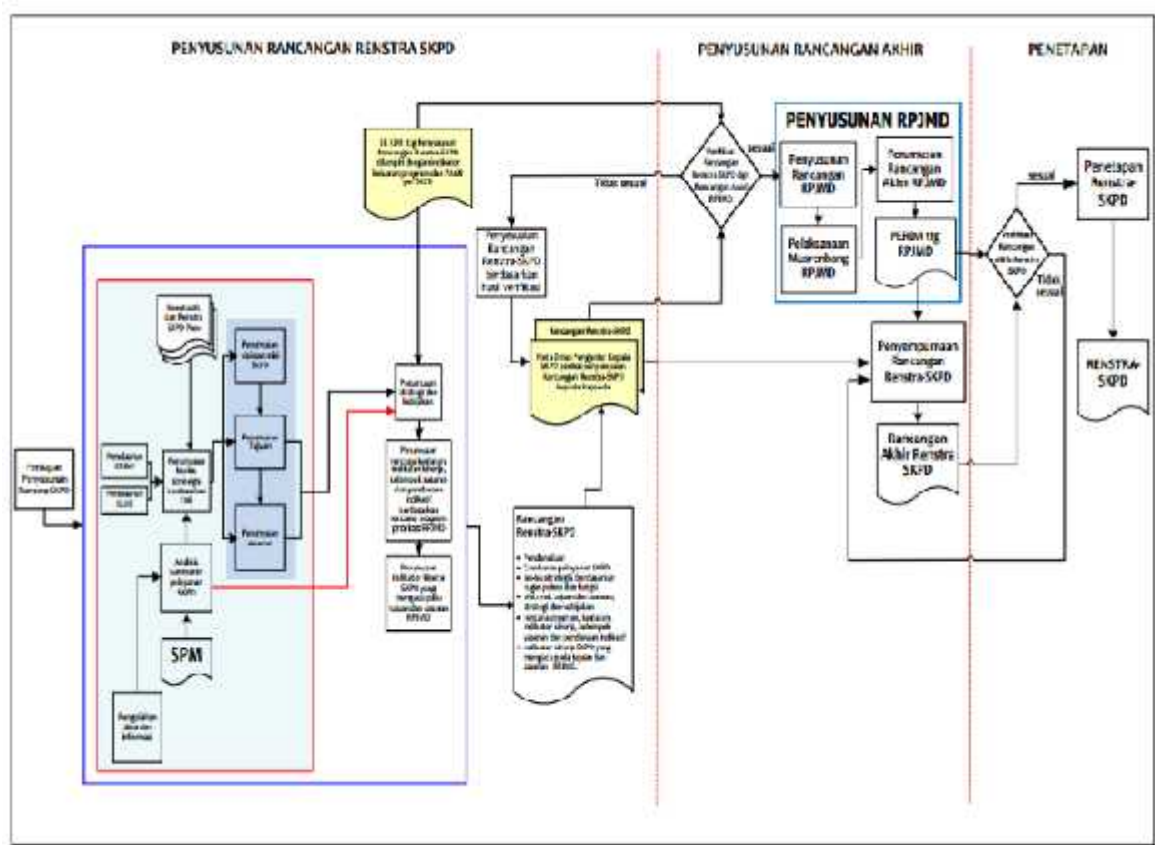
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (3)

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); (4) Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi Walikota Palu

”Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu periode 2021–2026 dilaksanakan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.
6. Penetapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.

Lebih lanjut dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu juga memperhatikan keselarasan antara RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kota Palu menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Palu;
- b. Rancangan RPJMD Kota Palu dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kota Palu, Hasil Musrenbang kemudian digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu;
- c. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Palu maka OPD Kota Palu menetapkan Rancangan Akhir Renstra OPD menjadi Renstra OPD, dimana Dinas Kesehatan Kota Palu juga menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu tentang Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- d. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kota Palu;
- e. Selanjutnya Renstra OPD menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Palu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Palu No 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Palu No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041;
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Walikota Palu No.9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah 1) menjabarkan RPJMD Kota Palu ke dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan; 2) menyelaraskan rencana Strategis Kota dengan Pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan Evaluasi Kinerja lima tahun lalu, menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah; serta 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 dapat diklasifikasi dalam 4 (empat) komponen yaitu:

1. Secara substansial, sebagai arah kebijakan Perangkat Daerah dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kesehatan yang memuat program dan kegiatan;
3. Secara operasional, menjadi arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintahan untuk Urusan Bidang Kesehatan;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Dinas Kesehatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan Dinas Kesehatan tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Palu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II B untuk Dinas Kesehatan Kota atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 5 (Lima) bidang, 3 (tiga) subbag, 15 (lima belas) seksi.

Tugas dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat ;
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat ;
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan ;
 1. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular ;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan ;
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan;
- f. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan ;
 - 1. Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Sarana dan Alat Kesehatan;
 - 3. Seksi Hukum dan SDM Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- h. Instalasi Farmasi dan Rumah Sakit;
- i. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam menjalankan roda organisasi Dinas daerah mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan

Tugas :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Fungsi :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- c) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2) Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Sub bagian Dinas Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c) Pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- d) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(1) Sub bagian Perencanaan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(2) Sub bagian Keuangan dan Aset

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(3) Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

3) Tugas dan Fungsi Bidang dan Seksi Dinas Kesehatan

a) Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(a) Seksi Kesehatan Keluarga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga.

(b) Seksi Gizi

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang gizi.

(c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

b) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Fungsi :

- (1) Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dan kesehatan Jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

(a) Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans

dan Imunisasi

- (b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.

- (c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

c) Bidang Pelayanan Kesehatan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

Fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan,

Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

- (a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Layanan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan.

- (b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan.

- (c) Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

d) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana Dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Penyiapan pelaksanaan Kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- (a) Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kefarmasian Makanan dan Minuman.

- (b) Seksi Sarana dan Alat Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Alat Kesehatan.

- (c) Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

e) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu memiliki tugas: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Perawatan kesehatan masyarakat
- d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
- e. Penyuluhan kesehatan masyarakat
- f. Pelaksanaan pengelolaan retribusi kesehatan masyarakat
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu terdiri 14 UPTD yaitu :

- 1) Puskesmas Pantoloan
- 2) Puskesmas Tawaeli
- 3) Puskesmas Mamboro
- 4) Puskesmas Talise
- 5) Puskesmas Singgani
- 6) Puskesmas Birobuli
- 7) Puskesmas Kawatuna
- 8) Puskesmas Mabelopura
- 9) Puskesmas Bulili
- 10) Puskesmas Kamonji
- 11) Puskesmas Sangurara
- 12) Puskesmas Tipo
- 13) Puskesmas Nosarara
- 14) Puskesmas Lere

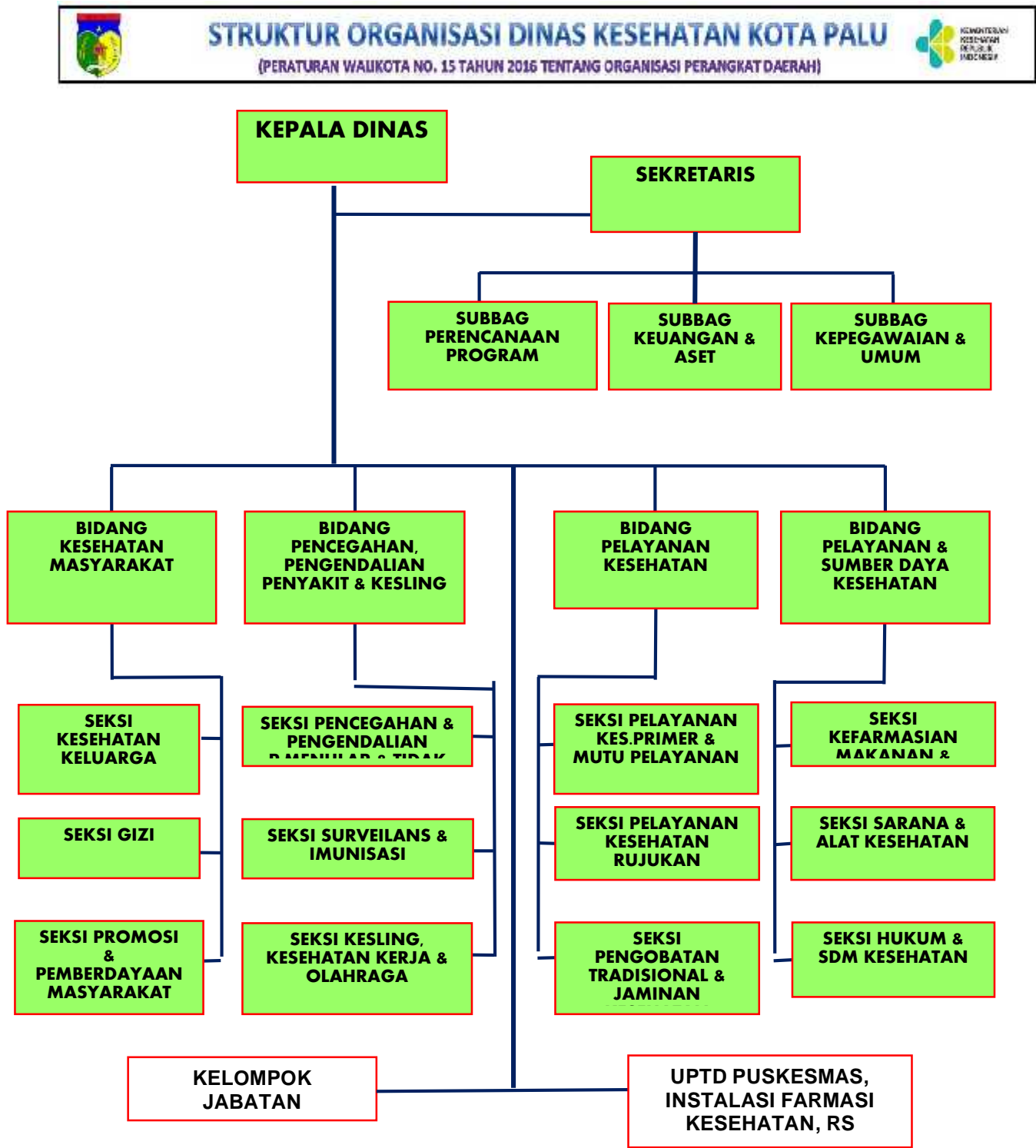
f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Palu, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat dalam Gambar 2.1. berikut :

Gambar 2.1



2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama Tahun 2020 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu (tersebar di Dinas Kesehatan, 14 UPTD Puskesmas, dan 1 UPTD Gudang Farmasi) adalah sebanyak 626 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan

| No. | Unit/UPTD | Jenis Kelamin | | Jumlah | Ket |
|-----|-------------------------|---------------|----|--------|-----|
| | | L | P | | |
| 1 | Dinkes Kota Palu | 20 | 53 | 73 | |
| 2 | UPTD: | | | | |
| | 1. Puskesmas Tawaeli | 8 | 27 | 35 | |
| | 2. Puskesmas Pantoloan | 7 | 32 | 39 | |
| | 3. Puskesmas Mamboro | 4 | 39 | 43 | |
| | 4. Puskesmas Talise | 5 | 40 | 45 | |
| | 5. Puskesmas Singgani | 1 | 47 | 48 | |
| | 6. Puskesmas Kawatuna | 5 | 34 | 39 | |
| | 7. Puskesmas Birobuli | 3 | 47 | 50 | |
| | 8. Puskesmas Mabelopura | 6 | 37 | 43 | |
| | 9. Puskesmas Bulili | 3 | 41 | 44 | |
| | 10. Puskesmas Kamonji | 3 | 52 | 55 | |
| | 11. Puskesmas Sangurara | 4 | 41 | 45 | |
| | 12. Puskesmas Tipo | 2 | 22 | 24 | |
| | 13. Puskesmas Nosarara | 3 | 26 | 29 | |
| | 14. Puskesmas Lere | 2 | 7 | 9 | |
| | 15. Gudang Farmasi | 2 | 3 | 5 | |
| | Jumlah | | | 626 | |

Sumber: Sub bag Kepegawaian & Umum, 2020

Terlihat dari tabel di atas bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu berada di paling banyak berjenis kelamin wanita (87,54%) dibandingkan laki-laki yang hanya 12,46%.

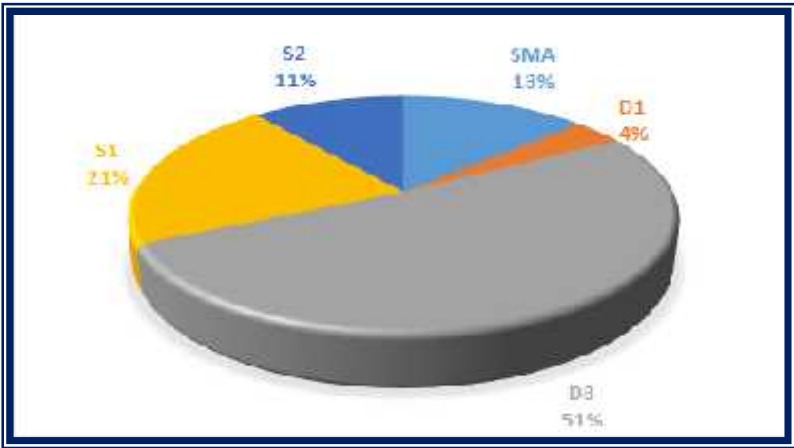
Tabel 2.2
SDM di lingkungan Dinkes Kota berdasarkan Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah (orang) |
|-----|-----------------------|----------------|
| 1 | Struktural eselon II | 1 |
| 2 | Struktural eselon III | 5 |
| 3 | Struktural eselon IV | 29 |
| 4 | Staf | 591 |
| | Jumlah | 626 |

Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah eselon (II, II, IV) sebanyak 35 orang (5,59%) dan jumlah staf sebanyak 591 orang (94,41%).

Gambar 2.2
SDM Kesehatan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum, 2020

Dari gambar terlihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu berada di jenjang D3 (51,28%) dan S1 sederajat (21,09%).

Selain itu data dan kebutuhan sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Kebutuhan dan Keadaan SDM Dinas Kesehatan Kota
Palu sampai dengan Tahun 2020

| No. | Uraian | Jumlah Pegawai Yang Ada | Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan | Kesenjangan |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | 73 | 118 | -45 |
| 2 | Puskesmas | 553 | 619 | -66 |
| 3 | Rumah Sakit | 499 | 648 | -149 |
| | TOTAL | 1.124 | 1.385 | -261 |

Sumber: Seksi SDMK, 2020

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber Sarana dan prasarana kesehatan yang terdaftar dalam asset tetap Dinas Dinas Kesehatan Kota Palu sampai dengan Desember 2020 tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Tahun 2020

| NO | SARANA PRASARANA | JUMLAH |
|-----------|--|--------|
| A. | SARANA | |
| 1 | Gedung Kantor | 1 |
| 2 | Puskesmas | 14 |
| 3 | Puskesmas Pembantu | 28 |
| 4 | Polindes | 3 |
| 5 | Poskesdes | 50 |
| 6 | Rumah Dinas Medis | 47 |
| 7 | Rumah Dinas Paramedis | 73 |
| 8 | Kendaraan Roda 4 (Pusling) | 16 |
| 9 | Kendaraan Roda 2 | 225 |
| 10 | Ambulance | 34 |
| 11 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 4 |
| 12 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 28 |
| B. | PRASARANA | |
| 1 | AC Sentral | 7 |
| 2 | AC Unit | 78 |
| 3 | Air Conditioning Unit | 6 |

| NO | SARANA PRASARANA | JUMLAH |
|----|---|--------|
| 4 | Alat Pemadam Kebakaran | 6 |
| 5 | Alat Pemadam Portable | 48 |
| 6 | Alat Pembantu Pemadam Kebakaran | 1 |
| 7 | Alat Rumah tangga lain (kursi Sofa 321) | 25 |
| 8 | Amplifier | 1 |
| 9 | Band Kas/brangkas | 6 |
| 10 | Bangku Tunggu | 181 |
| 11 | Blender | 4 |
| 12 | Camera + Attachment | 14 |
| 13 | Camera Electronic | 1 |
| 14 | Camera Video | 20 |
| 15 | Compact Disc | 21 |
| 16 | CPU | 1 |
| 17 | Dispenser | 15 |
| 18 | Facsimile | 2 |
| 19 | Filling Besi/Metal/Filing Kabinet | 6 |
| 20 | Freezer | 3 |
| 21 | Generator Set (Lab Scale) | 2 |
| 22 | Genset | 15 |
| 23 | Handphone | 4 |
| 24 | Handy Cam | 2 |
| 25 | Handy Talky | 2 |
| 26 | Hard Disk | 20 |
| 27 | Head Lamp | 30 |
| 28 | Kasur | 71 |
| 29 | Kipas Angin | 82 |
| 30 | Klem | 4 |
| 31 | Klem Rangkap | 4 |
| 32 | Kompor Gas | 4 |
| 33 | Kursi besi/metal | 37 |
| 34 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 12 |
| 35 | Kursi Kerja | 67 |
| 36 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 |

| NO | SARANA PRASARANA | JUMLAH |
|----|------------------------------------|--------|
| 37 | Kursi Lipat | 73 |
| 38 | Kursi Putar | 41 |
| 39 | Kursi Roda | 10 |
| 40 | Kursi Tamu | 10 |
| 41 | Laptop | 158 |
| 42 | Layar | 1 |
| 43 | Layar Film | 3 |
| 44 | LCD Projector | 4 |
| 45 | Lemari Arsip | 242 |
| 46 | Lemari Besi | 63 |
| 47 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain | 1 |
| 48 | Lemari ES | 40 |
| 49 | Lemari Kaca | 85 |
| 50 | Lemari Kayu | 44 |
| 51 | Lemari Pakaian | 2 |
| 52 | Lemari Penyimpanan | 67 |
| 53 | Loudspeaker | 2 |
| 54 | Megaphone | 1 |
| 55 | Meja Besi/Metal | 50 |
| 56 | Meja Biro | 46 |
| 57 | Meja Kayu/Rotan | 2 |
| 58 | Meja Kerja | 464 |
| 59 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 23 |
| 60 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 5 |
| 61 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | 2 |
| 62 | Meja Komputer | 5 |
| 63 | Meja Obat | 9 |
| 64 | Meja Periksa Pasien | 11 |
| 65 | Meja Rapat | 133 |
| 66 | Meja Resepsion | 5 |
| 67 | Meja Sunti Beroda | 10 |
| 68 | Mesin Absensi | 26 |

| NO | SARANA PRASARANA | JUMLAH |
|-----|------------------------------------|--------|
| 69 | Mesin Ketik | 1 |
| 70 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 8 |
| 71 | Mesin Potong Rumput | 1 |
| 72 | Mixer | 1 |
| 73 | Monitor | 41 |
| 74 | Note Book | 4 |
| 75 | Operating Lamp | 2 |
| 76 | P.C Unit | 200 |
| 77 | Papan Visuil | 21 |
| 78 | Penampungan Air Hujan (PAM) | 2 |
| 79 | Peralatan Tukang Besi Lain-lain | 2 |
| 80 | Personal Komputer | 41 |
| 81 | Personal Komputer Lain-lain | 1 |
| 82 | Pesawat Telephone | 9 |
| 83 | Photo Tustel | 2 |
| 84 | Pick Up | 1 |
| 85 | Printer | 213 |
| 86 | Proyektor + Attachment | 15 |
| 87 | Rak Kayu | 6 |
| 88 | Rak-rak Penyimpanan | 2 |
| 89 | Scooter | 3 |
| 90 | Screen projector | 1 |
| 91 | Sepeda Motor | 245 |
| 92 | Sofa | 24 |
| 93 | Sound System | 4 |
| 94 | Tangga Almunium | 1 |
| 95 | Telephone (PABX) | 38 |
| 96 | Televisi | 225 |
| 97 | Tempat Tidur Besi/ Metal (Lengkap) | 50 |
| 98 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 12 |
| 99 | Tenda | 1 |
| 100 | Tombol Kebakaran/ Alarm | 8 |

| NO | SARANA PRASARANA | JUMLAH |
|-----|---|--------|
| 101 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 13 |
| 102 | TV Monitor | 1 |
| 103 | Unit Power Supply | 1 |
| 104 | UPS | 28 |
| 105 | Video Tape Recorder Portable | 1 |
| 106 | White Board | 1 |

Sumber : Subag. Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan, 2020

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan keberhasilan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Palu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD yang telah diatur pada Perwali No.9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dan dibandingkan dengan target SPM (diatur dalam PERMENKES No 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan), target IKU (diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah) dan juga dengan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta target indikator kesehatan lainnya.

2.3.1 Indikator Makro Bidang Kesehatan

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan indikator makro bidang kesehatan, yaitu:

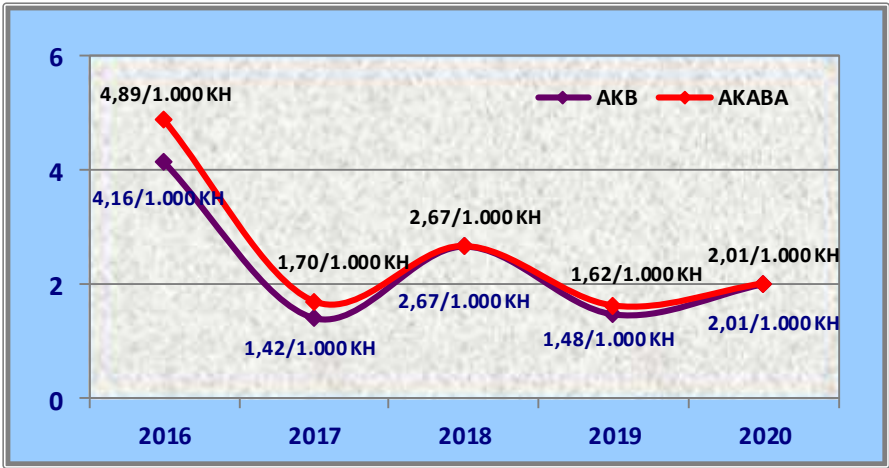
a. Angka Kematian Bayi/Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, air bersih, dan infeksi penyakit di masyarakat.

AKB dan AKABA di Kota Palu nilainya berfluktuasi sejak beberapa tahun terakhir, dimana AKB pada Tahun 2020 sebesar 2,01 per-1.000 KH dengan 15 kasus kematian, meningkat jika dibandingkan dengan AKB Tahun 2019 yaitu 1,48 per-1.000 KH (11 kasus) dan AKB Tahun 2018 yaitu 2,67 per-1.000 KH (19 kasus). Adapun AKABA pada Tahun 2020 sebesar 2,01 per-1.000 KH (15 kasus kematian), meningkat dari Tahun 2019 yaitu 1,62 per-1.000 KH (11 kasus) dan meningkat di Tahun 2018 sebesar 2,67 per-1.000 KH (19 kasus).

Penyebab kematian terbanyak pada bayi adalah BBLR, aspirasi, asfiksia dan penyebab lain-lain (masalah plasenta, tali pusar, cacat lahir dengan atau tanpa kelainan kromosom, kondisi kesehatan ibu serta infeksi selama kehamilan).

Gambar 2.3
Angka Kematian Bayi/Balita per1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2016-2020

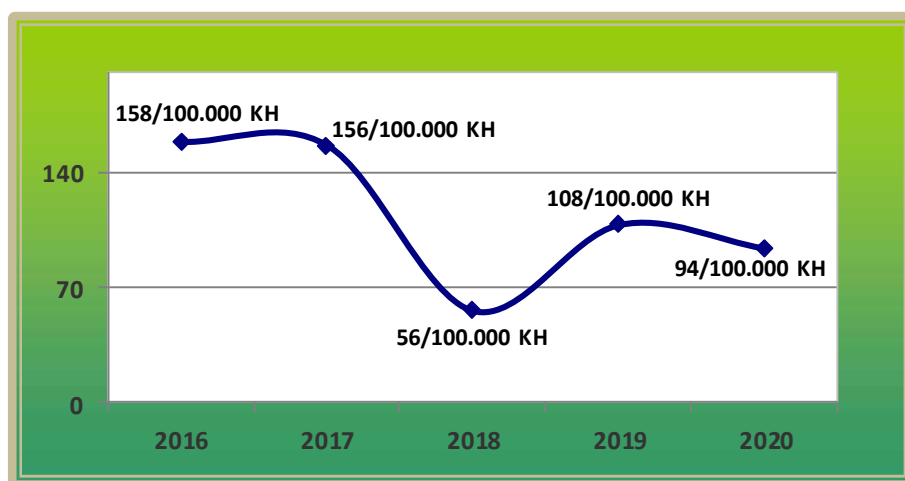


Sumber : Seksi KIA, 2021

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dari derajat kesehatan.

Gambar 2.4
Angka Kematian Ibu per100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2016-2020



Sumber : Seksi KIA, 2021

Selama lima tahun terakhir AKI di Kota Palu cenderung mengalami penurunan kasus, dimana terjadi penurunan dari 156 per-100.000 KH pada Tahun 2017 (11 kasus kematian) menjadi 56 per 100.000 KH pada Tahun 2018 dengan 4 kasus kematian. Dan terakhir di Tahun 2020 AKI Kota Palu hanya sebesar 93,70 per 100.000 KH (7 kasus kematian).

Dari fakta yang ada di lapangan, faktor penyebab langsung kematian ibu masih didominasi oleh eklampsia dan penyebab lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu adalah faktor 3 (tiga) Terlambat yaitu terlambat mencapai fasilitas pelayanan, terlambat mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, dan 4 (empat) Terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Keduanya saling berkaitan dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Demikian juga keberadaan Puskesmas PONED dan RS PONEK harus di iringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja juga menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Meningkatnya peserta KB juga merupakan potensi dalam menurunkan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan juga menjadi potensi dalam program peningkatan gizi ibu hamil, sehingga kedepan akan terus dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Dalam upaya akselerasi penurunan AKI dan AKB di Kota Palu telah diadakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap percepatan penurunan AKI dan AKB antara lain peningkatan cakupan dan kualitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kegiatan P4K (Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), pertemuan AMP (Audit Maternal Perinatal) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun guna membahas faktor penyebab kematian bayi dan ibu serta upaya penanganannya, pelacakan kasus Bumil Resti, pertemuan evaluasi dan tindak lanjut PWS-KIA, Pelatihan Orientasi Pemasaran Sosial bagi bidan kelurahan.

c. Status Gizi Balita

Gizi lebih dan gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Termasuk dalam kelompok gizi lebih adalah *overweight* (obesitas) dan eksek mikronutrien (misalnya

kelebihan natrium). Kelompok gizi kurang antara lain *underweight*, *wasting*, *stunting*, dan defisiensi mikronutrien.

Penurunan prevalensi *wasting* dan *stunting* pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Upaya penurunan *stunting* tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan *stunting*, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program.

Selain itu permasalahan kasus gizi buruk juga masih perlu perhatian lebih, karena sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu dengan tingkat pendidikan yang rendah, terutama kurangnya pengetahuan ibu tentang pola asuh dan pemberian makanan, sehingga tidak dapat mempertahankan status gizi balita pasca penanganan, keadaan ini menyebabkan munculnya secara berulang kasus gizi buruk.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan bahwa seluruh kasus gizi buruk harus mendapat penanganan 100% baik secara rawat inap maupun rawat jalan atau perawatan di rumah.

Tabel 2.5
Status Gizi di Kota Palu Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------|------|-------|------|------|
| a. Prevalensi Gizi Buruk | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,16 |
| b. Prevalensi Gizi Kurang | 2,49 | 2,39 | 2,52 | 2,75 | 3,37 |
| c. Prevalensi Wasting | 21,3 | 10,1 | 15,45 | 11,7 | 6,6 |
| d. Prevalensi Stunting | 33,8 | 36,8 | 24,07 | 17,9 | 14 |

Sumber : Seksi Gizi, 2021

Cakupan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Kota Palu selama 5 tahun terakhir telah memenuhi target Renstra 2016-2021 dengan capaian gizi buruk $\leq 1\%$ dan gizi kurang $\leq 5\%$. Upaya-upaya penanggulangan kasus gizi buruk di

wilayah Kota Palu yang telah dilakukan antara lain dengan mengaktifkan pelacakan dan validasi kasus dari Puskesmas ke Rumah Sakit, memberdayakan keluarga kasus gizi buruk melalui pendampingan pasca kasus dan monitoring secara berkelanjutan agar kasus gizi buruk pada balita yang sama tidak terjadi.

Untuk menurunkan *underweight*, *stunting*, dan *wasting*, tenaga kesehatan di puskesmas juga harus mampu melaksanakan surveilans gizi dengan benar dan mampu melakukan manajemen balita gizi buruk atau balita sangat kurus.

2.3.2 Indikator Pelayanan Urusan Wajib Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu juga terdapat di dalam kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selama Tahun Renstra 2016 s/d 2021 Dinas Kesehatan Kota Palu mengukur dan mengevaluasi kinerja program sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam Permenkes yang baru, Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.23) berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu

| NO . | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD | TARGE T SPM | TARGE T IKU/IK | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | | | | | |
|---------|--|----------------|-------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| A. | STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,61 | 95,58 | 98,85 | 100,31 | | | 97,61 | 95,58 | 98,85 | 100,31 | 0,00 | |
| | 2. Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,50 | 96,67 | 100,30 | 100,26 | | | 97,50 | 96,67 | 100,30 | 100,26 | 0,00 | |
| | 3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,89 | 100 | 108,54 | 105,30 | | | 83,89 | 100,00 | 108,54 | 105,30 | 0,00 | |
| | 4. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,54 | 79,64 | 76,21 | 85,96 | | | 87,54 | 79,64 | 76,21 | 85,96 | 0,00 | |
| | 5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 99,66 | 32,00 | 66,16 | | | 100,00 | 99,66 | 32,00 | 66,16 | 0,00 | |
| | 6. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17,79 | 15,63 | 25,03 | 9,40 | | | 17,79 | 15,63 | 25,03 | 9,40 | 0,00 | |
| | 7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,92 | 83,35 | 80,21 | 47,84 | | | 92,92 | 83,35 | 80,21 | 47,84 | 0,00 | |
| | 8. Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37,23 | 100 | 19,11 | 11,42 | | | 37,23 | 100,00 | 19,11 | 11,42 | 0,00 | |
| | 9. Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31,00 | 100 | 26,71 | 14,81 | | | 31,00 | 100,00 | 26,71 | 14,81 | 0,00 | |
| | 10. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,41 | 78,33 | | | 100,00 | 100,00 | 87,41 | 78,33 | 0,00 | |
| | 11. Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 98,63 | 37,81 | 23,23 | | | 100,00 | 98,63 | 37,81 | 23,23 | 0,00 | |
| | 12. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100 % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71,25 | 100,00 | 101,01 | 102,49 | | | 71,25 | 100,00 | 101,01 | 102,49 | 0,00 | |
| B. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas | | 89 % | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | | 78,21 | 76,82 | 78,35 | 78,72 | | | 95,38 | 91,45 | 91,10 | 89,45 | 0,00 | |
| | 2. Prevalensi Gizi Buruk | | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,5 | | 0,167 | 0,155 | 0,158 | 0,216 | | | 25,30 | 25,00 | 27,24 | 40,00 | 0,00 | |
| | 3. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa | | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4. Cakupan Desa Siaga Aktif | | 100 % | 97,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 102,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD | TARGET SPM | TARGET IKU/IK | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | | | | | |
|----|---|------------|---------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| C. | INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Permendagri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi | | | 0,9964 | 0,9971 | 0,9977 | 0,9982 | 0,9986 | | 0,996 | 0,997 | 0,997 | 0,998 | | | 100,00 | 100,02 | 99,96 | 99,98 | 0,00 | |
| | 2. Angka kematian Balita per 1.000 Kelahiran hidup | | | 5,29 | 4,43 | 2,52 | 2,43 | 2,23 | | 1,70 | 2,67 | 1,62 | 2,01 | | | 32,14 | 60,27 | 64,29 | 82,72 | 0,00 | |
| | 3. Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran hidup | | | 2,00 | 1,86 | 2,43 | 2,2 | 2,01 | | 1,13 | 2,97 | 0,94 | 2,01 | | | 56,50 | 159,68 | 38,68 | 91,36 | 0,00 | |
| | 4. Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup | | | 243,00 | 228,57 | 50 | 37 | 28 | | 156 | 56 | 107 | 80 | | | 64,20 | 24,50 | 214,00 | 216,22 | 0,00 | |
| | 5. Rasio Puskesmas per satuan Penduduk | | | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | | 3,42 | 3,37 | 3,55 | 3,77 | | | 100,59 | 93,61 | 98,61 | 99,21 | 0,00 | |
| | 6. Rasio Dokter per satuan Penduduk | | | 43 | 44 | 98,75 | 98,93 | 99,01 | | 80,04 | 88,54 | 51,96 | 59,30 | | | 186,14 | 201,23 | 52,62 | 59,94 | 0,00 | |
| | 7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 106,67 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 106,67 | 0,00 | |
| | 8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan | | | 96,5 | 97 | 97,02 | 97,31 | 97,5 | | 97,51 | 96,67 | 100,28 | 100,30 | | | 101,05 | 99,66 | 103,36 | 103,07 | 0,00 | |
| | 9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | | | 100 | 100 | 94,32 | 95,52 | 96,33 | | 91,31 | 93,48 | 93,48 | 95,66 | | | 91,31 | 93,48 | 99,11 | 100,15 | 0,00 | |
| | 10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 11. AFP Rate per 100.000 penduduk | | | 2 | 2 | 2,11 | 1,9 | 1,75 | | 6,01 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | | | 300,50 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | | | 100 | 100 | 96,2 | 97,1 | 98,44 | | 116,95 | 95,09 | 96,87 | 98,02 | | | 116,95 | 95,09 | 100,70 | 100,95 | 0,00 | |
| | 13. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 14. Penderita Diare yang ditangani | | | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 86,17 | 100 | 100 | 100 | | | 90,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | | | 100 | 100 | 24,01 | 24,19 | 25 | | 8,66 | 24,05 | | | | | 8,66 | 24,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16. Cakupan kunjungan bayi | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 101,04 | 126,52 | 93,20 | 100,96 | | | 101,04 | 126,52 | 93,20 | 100,96 | 0,00 | |
| | 17. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | | | 82 | 84 | 86 | 90 | 95 | | 86,28 | 86,97 | 90,74 | 88,79 | | | 105,22 | 103,54 | 105,51 | 98,66 | 0,00 | |
| | 18. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | | | 61,48 | 63 | 64 | 65 | 100 | | 95,67 | 66,26 | | | | | 155,61 | 105,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 19. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

2.3.3 Anggaran Kesehatan

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsure penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Pemenuhan target pendapatan diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Secara rinci Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu

| Uraian | Tahun | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 868.928.415 | 919.321.811 | 779.773.872 | 879.667.289 | 954.553.750 |
| 1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas | 868.928.415 | 919.321.811 | 779.773.872 | 879.667.289 | 954.553.750 |
| 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 13.127.638.860 | 14.403.683.928 | 13.542.261.229 | 16.117.185.300 | 15.162.552.439 |
| 2.1 Dana Kapitasi JKN/BPJS | 12.085.763.860 | 14.399.288.970 | 13.542.261.229 | 16.117.185.300 | 14.238.247.439 |
| 2.2 Dana Klaim Pelayanan BPJS | 1.041.875.000 | 4.394.958 | 9.609.051 | - | 924.305.000 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | 13.996.567.275 | 15.323.005.739 | 14.322.035.101 | 16.996.852.619 | 16.117.106.189 |

Sumber : Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan

Berdasarkan pada tabel diatas, rata-rata realisasi PAD Dinas Kesehatan Kota Palu pada tahun 2016–2020 menunjukkan fluktuasi peningkatan, namun pada Tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 5,46%.

b. Belanja Daerah

Secara garis besar alokasi pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah Anggaran | Realisasi | Persentase (%) |
|-----|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2016 | 114.949.530.446 | 108.276.732.287 | 94,19 |
| 2 | 2017 | 93.669.864.550 | 87.477.578.690 | 93,39 |
| 3 | 2018 | 102.424.409.676 | 92.749.072.083 | 90,55 |
| 4 | 2019 | 116.947.894.029 | 106.689.358.889 | 91,22 |
| 5 | 2020 | 136.780.109.406 | 122.709.900.492 | 89,71 |

Sumber: Bidang Sekretariat, 2020

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Secara rinci realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kesehatan Kota Palu

| URAIAN | | ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI | |
|--------|----|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------|--------|---|--------|---------|----------|---------------------------------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (3) | (4) | (5) | (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (18) | (18) | (19) |
| 1 | 02 | KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.403.840.780 | 7.245.107.552 | 7.484.248.550 | 8.085.467.756 | 4.363.602.938 | 7.021.504.773 | 8.020.078.245 | 99,09 | 96,91 | 95,00 | 99,19 | 29,39 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
| 1 | 02 | 01 | Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 403.719.600 | 617.297.352 | 670.961.990 | 743.400.000 | 382.825.111 | 593.661.899 | 742.976.320 | 94,82 | 96,17 | 87,50 | 99,94 | 27,13 | 36,14 | 27,13 | 36,14 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air & listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34.600.000 | 1.293.621.000 | 1.459.960.000 | 2.087.420.000 | 25.274.600 | 1.200.636.213 | 2.051.300.550 | 73,05 | 92,81 | 86,98 | 98,27 | 923,66 | 1.179,42 | 923,66 | 1.179,42 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.935.550.000 | 4.088.950.000 | 4.025.730.000 | 4.327.250.894 | 2.935.550.000 | 4.029.550.000 | 4.318.806.565 | 100,00 | 98,55 | 99,18 | 99,80 | 28,92 | 29,12 | 28,92 | 29,12 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 46.079.000 | 213.685.550 | 307.403.200 | 332.536.000 | 46.064.080 | 201.676.550 | 330.737.235 | 99,97 | 94,38 | 98,80 | 99,46 | 91,94 | 87,32 | 91,94 | 87,32 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49.400.000 | 82.500.000 | 82.500.000 | 27.750.000 | 49.400.000 | 82.500.000 | 27.750.000 | 100,00 | 100,00 | 85,12 | 100,00 | 13,16 | 11,05 | 13,16 | 11,05 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 243.511.580 | 267.214.600 | 253.186.360 | 116.944.562 | 243.507.953 | 267.128.200 | 115.576.000 | 100,00 | 99,97 | 95,47 | 98,83 | 5,11 | 4,45 | 5,11 | 4,45 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan barang cetakan & pengandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 185.528.600 | 243.421.000 | 230.707.000 | 243.882.000 | 185.528.600 | 243.416.000 | 243.150.975 | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 99,70 | 166,61 | 166,58 | 166,61 | 166,58 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30.022.500 | 24.053.800 | 15.725.000 | 12.960.000 | 30.004.500 | 24.053.400 | 0 | 99,94 | 100,00 | 95,47 | 0,00 | (18,02) | (39,35) | (18,02) | (39,35) |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 61.892.500 | 97.964.250 | 47.545.000 | 63.945.000 | 60.315.250 | 94.043.511 | 63.325.000 | 97,45 | 96,00 | 49,71 | 99,03 | (4,89) | 22,55 | (4,89) | 22,55 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.240.000 | 9.900.000 | 6.430.000 | 6.430.000 | 6.240.000 | 9.635.000 | 4.360.000 | 100,00 | 97,32 | 51,17 | 67,81 | 5,90 | 5,27 | 5,90 | 5,27 |
| 1 | 02 | 01 | Penyediaan makanan & minuman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 41.747.000 | 25.800.000 | 25.800.000 | 21.162.500 | 33.777.000 | 25.482.500 | 21.080.000 | 80,91 | 98,77 | 99,86 | 99,61 | (23,50) | (22,83) | (23,50) | (22,83) |
| 1 | 02 | 01 | Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 365.550.000 | 280.700.000 | 358.300.000 | 101.786.800 | 365.115.844 | 249.721.500 | 101.015.600 | 99,88 | 88,96 | 97,54 | 99,24 | (25,87) | (24,78) | (25,87) | (24,78) |
| 1 | 02 | 01 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 759.244.000 | 0 | 0 | 0 | 758.876.266 | 0 | 0 | 99,95 | | | | (25,00) | (25,00) | (25,00) | (25,00) |
| 1 | 02 | 01 | Pembangunan gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 02 | 01 | Pengadaan mobil jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 109.200.000 | | | | 109.200.000 | | | 100,00 | | | | (25,00) | (25,00) | (25,00) | (25,00) |
| 1 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 650.044.000 | | | | 649.676.266 | | | 99,94 | | | | (25,00) | (25,00) | (25,00) | (25,00) |
| 1 | 02 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.625.000 | 1.797.000 | 7.411.000 | 289.446.000 | 2.625.000 | 1.650.000 | 7.411.000 | 39,62 | 91,82 | 100,00 | 95,13 | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 957,45 |
| 1 | 02 | 05 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.000.000 | | | 245.500.000 | 0 | | 242.100.000 | 0,00 | | | 98,62 | (25,00) | (25,00) | (25,00) | 0,00 |
| 1 | 02 | 05 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) | (25,00) | (25,00) |
| 1 | 02 | 05 | Bimtek Implementasi Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 02 | 05 | Penyusunan PAK tenaga fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.625.000 | 1.797.000 | 7.411.000 | 43.946.000 | 2.625.000 | 1.650.000 | 7.411.000 | 100,00 | 91,82 | 100,00 | 75,64 | 169,47 | 141,15 | 169,47 | 141,15 |
| 1 | 02 | 05 | Pemilihan tenaga kesehatan berprestasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| URAIAN | | ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|--------|----|---------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|------|------|-----------------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | (3) | (4) | (5) | (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (18) | (19) | (18) | (19) | (19) |
| 1 | 02 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 41.648.000 | 230.035.000 | 146.193.500 | 119.617.000 | 41.648.000 | 226.015.000 | 119.116.500 | 100,00 | 98,25 | 97,20 | 99,58 | 99,43 | 97,34 | | | | | |
| 1 | 02 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD | 102.661.000 | 83.955.500 | | 180.251.000 | 102.661.000 | | 99,60 | 100,00 | 99,40 | (15,37) | (15,44) | | | | | |
| 1 | 02 | 06 | 05 | Penyusunan Profil Kesehatan | 41.648.000 | 35.661.500 | 41.648.000 | 45.764.000 | 39.432.500 | 100,00 | 93,27 | 90,58 | 100,00 | (2,89) | (3,38) | | | | | |
| 1 | 02 | 15 | Program Obat & Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.369.590.208 | 8.736.568.422 | 3.422.586.950 | 13.977.611.899 | 7.267.681.863 | 8.261.611.009 | 13.846.558.119 | 98,62 | 94,56 | 96,29 | 99,06 | 57,35 | 59,79 | | | | | |
| 1 | 02 | 15 | 01 | Pengadaan obat & perbekalan kesehatan | 7.369.590.208 | 13.977.611.899 | 7.267.681.863 | 8.261.611.009 | 13.846.558.119 | 98,62 | 94,56 | 96,29 | 99,06 | 57,35 | 59,79 | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23.311.049.913 | 34.060.314.979 | 38.211.888.150 | 53.446.228.838 | 22.608.835.323 | 30.282.853.689 | 46.287.757.946 | 96,99 | 88,91 | 85,41 | 86,61 | 28,07 | 26,68 | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | 01 | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & lingkungannya | 8.100.000 | 19.811.386.000 | 8.100.000 | 17.500.900 | 19.688.266.388 | 100,00 | 42,49 | 90,03 | 99,38 | 6.413,03 | 13.435,14 | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | 02 | Pemeliharaan & pemulihan kesehatan | 6.166.930.200 | 12.247.877.500 | 6.165.622.700 | 7.602.688.950 | 9.752.021.487 | 99,98 | 81,45 | 75,26 | 79,62 | 45,75 | 39,10 | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | 12 | Peningkatan Pelayanan penanggulangan masalah kesehatan | 17.136.019.713 | 21.257.745.338 | 16.435.112.623 | 22.529.821.439 | 16.724.655.271 | 95,91 | 91,96 | 88,89 | 78,68 | 12,05 | 9,23 | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | 14 | Penyelenggaraan penyehatan lingkungan daerah miskin | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | 17 | Peningkatan pelayanan kesehatan khusus RS | 184.470.000 | 129.220.000 | | 132.842.400 | 122.814.800 | | 72,01 | 77,97 | 95,04 | (26,32) | (26,32) | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | 18 | Peningkatan pelayanan kesehatan siswa | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) | | | | | |
| 1 | 02 | 16 | 20 | Dukungan operasional Puskesmas | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) | | | | | |
| 1 | 02 | 17 | Program Pengawasan Obat & Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 67.470.400 | 118.836.500 | 18.468.750 | 226.651.000 | 67.470.000 | 111.586.000 | 223.551.000 | 100,00 | 93,90 | 99,84 | 98,63 | 310,11 | 303,97 | | | | | |
| 1 | 02 | 17 | 02 | Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya | 67.470.400 | 118.836.500 | 67.470.000 | 111.586.000 | 18.438.750 | 100,00 | 93,90 | 99,84 | 98,63 | 310,11 | 303,97 | | | | | |
| 1 | 02 | 19 | Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.243.347.500 | 873.944.800 | 1.130.180.000 | 1.036.691.700 | 1.242.397.500 | 872.144.800 | 1.032.751.700 | 99,92 | 99,79 | 99,83 | 99,62 | 5,67 | 6,66 | | | | | |
| 1 | 02 | 19 | 01 | Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat | 321.555.000 | 270.231.700 | 321.555.000 | 67.602.000 | 343.639.000 | 100,00 | 100,00 | 99,45 | 99,99 | 81,94 | 83,55 | | | | | |
| 1 | 02 | 19 | 02 | Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan | 921.792.500 | 766.460.000 | 920.842.500 | 804.342.800 | 784.634.400 | 99,90 | 99,78 | 100,00 | 99,49 | (4,38) | #DIV/0! | | | | | |
| 1 | 02 | 19 | 06 | Sosialisasi desa siaga | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) | | | | | |
| 1 | 02 | 19 | 07 | Pemetaan PHBS | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) | | | | | |
| 1 | 02 | 19 | 10 | Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH) | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) | | | | | |
| 1 | 02 | 19 | 13 | Pembinaan Posyandu | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) | | | | | |
| 1 | 02 | 20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.418.513.000 | 699.372.000 | 0 | 473.064.000 | 1.418.213.000 | 699.372.000 | 472.839.000 | 99,98 | 100,00 | | 99,95 | (25,72) | (25,71) | | | | | |
| 1 | 02 | 20 | 03 | Penanggulangan KEP. Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya | 1.418.513.000 | 473.064.000 | 1.418.213.000 | 699.372.000 | 472.839.000 | 99,98 | 100,00 | | 99,95 | (25,72) | (25,71) | | | | | |

| URAIAN | | ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | | |
|--------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|----------------|---------------|--------------|-------|-----------------------|---------|----------|
| | | 2017 (3) | 2018 (4) | 2019 (5) | 2020 (6) | 2017 (9) | 2018 (10) | 2019 (11) | 2020 (12) | 2017 (14) | 2018 (15) | 2019 (16) | 2020 (17) | 2020 (18) | 2020 (19) | | | | |
| 1 | 02 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | 0 | 89.179.000 | 52.165.000 | 76.730.000 | 0 | 66.597.500 | 31.054.000 | 61.539.100 | 74,68 | 59,53 | 80,20 | (23,60) | (13,80) |
| 1 | 02 21 | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | | | | | | | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) |
| 1 | 02 21 | Monitoring, evaluasi & pelaporan | | | | | | 89.179.000 | 52.165.000 | 76.730.000 | | 66.597.500 | 31.054.000 | 61.539.100 | 74,68 | 59,53 | 80,20 | (23,60) | (13,80) |
| 1 | 02 21 | Penyehatan air | | | | | | | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) |
| 1 | 02 22 | Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | 913.685.900 | 706.335.750 | 444.047.400 | 7.139.031.000 | 911.843.500 | 699.809.000 | 405.104.450 | 5.712.501.031 | 99,80 | 99,08 | 91,23 | 80,02 | 349,36 |
| 1 | 02 22 | Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | 723.888.500 | 434.805.750 | 250.157.400 | 99.401.000 | 723.271.300 | 433.905.500 | 230.296.850 | 97.370.325 | 99,91 | 99,79 | 92,06 | 97,96 | (46,16) |
| 1 | 02 22 | Peningkatan Imunitasi | | | | | 35.582.400 | 68.200.000 | 51.610.000 | 16.150.000 | 34.372.500 | 67.199.500 | 43.610.000 | 16.150.000 | 96,60 | 98,53 | 84,50 | 100,00 | (23,58) |
| 1 | 02 22 | Peningkatan Surveillans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah | | | | | 82.070.000 | 69.315.500 | 30.217.500 | 6.883.297.500 | 82.054.700 | 67.315.500 | 22.247.500 | 5.536.367.206 | 99,98 | 97,11 | 73,62 | 80,43 | 5.675,82 |
| 1 | 02 22 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra | | | | | 72.145.000 | 134.014.500 | 112.062.500 | 140.182.500 | 72.145.000 | 131.388.500 | 108.950.100 | 62.613.500 | 100,00 | 98,04 | 97,22 | 44,67 | 34,88 |
| 1 | 02 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | 1.073.351.686 | 286.773.300 | 1.422.598.875 | 1.270.726.000 | 1.001.738.394 | 268.464.900 | 691.343.475 | 317.746.000 | 93,33 | 93,62 | 48,60 | 25,01 | 92,61 |
| 1 | 02 23 | Penyusunan standar pelayanan kesehatan | | | | | 493.571.686 | 205.581.800 | 1.422.598.875 | 1.270.726.000 | 491.071.686 | 188.608.400 | 691.343.475 | 317.746.000 | 99,49 | 91,74 | 48,60 | 25,01 | 160,34 |
| 1 | 02 23 | Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan | | | | | 579.780.000 | | | | 510.666.708 | | | | 88,08 | | | | (16,26) |
| 1 | 02 23 | Monitoring, evaluasi & pelaporan | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | (25,00) |
| 1 | 02 23 | Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | 02 23 | Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan | | | | | 81.191.500 | | | | | 79.856.500 | | | #DIV/0! | 98,36 | #DIV/0! | #DIV/0! | (25,00) |
| 1 | 02 24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | | | | | 100.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 83.200.000 | 0 | 0 | 100,00 | 57,78 | | | (32,34) |
| 1 | 02 24 | Pelayanan Operasi Katarak | | | | | | | | | | | | | | | | | (25,00) |
| 1 | 02 24 | Pelayanan Operasi Bibir Sumbing | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | 02 24 | Pelayanan Sunatan Massal | | | | | 100.000.000 | 144.000.000 | | | 100.000.000 | 83.200.000 | | | 100,00 | 57,78 | | | (22,39) |
| 1 | 02 25 | Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya | | | | | 8.649.768.719 | 11.149.785.038 | 24.473.570.933 | 6.490.690.051 | 8.028.559.168 | 7.715.795.509 | 22.676.359.522 | 4.641.787.146 | 92,82 | 69,20 | 92,66 | 71,51 | (0,93) |
| 1 | 02 25 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | 399.875.000 | 14.696.118.790 | 611.404.149 | | 294.484.850 | 13.585.634.772 | 450.643.464 | | 73,64 | 92,44 | 73,71 | 844,83 |
| 1 | 02 25 | Pembangunan Puskesmas Pembantu | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | 02 25 | Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas | | | | | 8.185.818.719 | 4.175.191.759 | 6.304.819.925 | 5.794.305.902 | 7.628.813.249 | 3.427.642.466 | 5.905.661.286 | 4.191.143.682 | 93,20 | 82,10 | 93,67 | 72,33 | (19,57) |
| 1 | 02 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas | | | | | 202.000.000 | 3.013.679.891 | 54.600.000 | 84.980.000 | 143.931.460 | 1.809.927.850 | 54.600.000 | 0 | 71,25 | 60,06 | 100,00 | 0,00 | 336,24 |
| 1 | 02 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Pembantu | | | | | | 38.987.500 | | | | 20.327.750 | | | | 52,14 | | | (50,00) |
| 1 | 02 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Kelling | | | | | 34.000.000 | 88.000.000 | 54.600.000 | | 33.610.937 | 40.507.293 | 0 | | 98,86 | 46,03 | 0,00 | | (8,45) |
| 1 | 02 25 | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu | | | | | | 3.434.050.888 | 3.363.432.218 | | | 2.122.905.300 | 3.130.463.464 | | | 61,82 | 93,07 | | (25,51) |

| URAIAN | | ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------|-------|---|-------|---------|------|------|-----------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | ANGGARAN | REALISASI |
| | | (3) | (4) | (5) | (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (18) | (18) | (18) | (19) |
| 1 02 25 23 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 227.950.000 | | | | 222.203.522 | | | | 97,48 | | | | | | | 21,58 | 19,77 |
| 1 02 25 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | (25,00) | (25,00) |
| 1 02 25 26 | Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 02 25 27 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Medis dan Paramedis | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 02 29 | Program Pelatihan & Pendidikan Perawatan Anak Balita | 66.746.000 | 0 | 0 | 0 | 66.746.000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | | | (21,10) | | | (21,10) | (21,10) |
| 1 02 29 04 | Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita | 66.746.000 | | | | 66.746.000 | | | | 100,00 | | | | (21,10) | | | (21,10) | (21,10) |
| 1 02 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 279.810.000 | 258.875.000 | 223.337.500 | 246.455.000 | 279.341.000 | 258.776.000 | 195.287.500 | 189.055.000 | 99,83 | 99,96 | 87,44 | 76,71 | 22,50 | | | 22,50 | 16,35 |
| 1 02 30 01 | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan | 279.810.000 | 258.875.000 | 223.337.500 | 246.455.000 | 279.341.000 | 258.776.000 | 195.287.500 | 189.055.000 | 99,83 | 99,96 | 87,44 | 76,71 | 22,50 | | | 22,50 | 16,35 |
| 1 02 32 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak | 1.466.480.164 | 2.200.214.300 | 1.713.716.917 | 1.413.351.750 | 996.686.153 | 1.606.232.908 | 1.148.313.658 | 609.100.206 | 67,96 | 73,00 | 67,01 | 43,10 | 15,23 | | | 15,23 | (2,79) |
| 1 02 32 04 | Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan | 1.466.480.164 | 2.200.214.300 | 1.713.716.917 | 1.413.351.750 | 996.686.153 | 1.606.232.908 | 1.148.313.658 | 609.100.206 | 67,96 | 73,00 | 67,01 | 43,10 | 15,23 | | | 15,23 | (2,79) |
| 1 02 34 | Program Kebijakan & Manajemen Pengembangan Kesehatan | 185.052.000 | 0 | 0 | 0 | 184.671.600 | 0 | 0 | 0 | 99,79 | | | | (42,50) | | | (42,50) | (42,50) |
| 1 02 34 01 | Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan | 74.085.000 | | | | 73.704.600 | | | | 99,49 | | | | (45,17) | | | (45,17) | (45,18) |
| 1 02 34 02 | Penyusunan Profil Kesehatan | | | | | | | | | | | | | (25,00) | | | (25,00) | (25,00) |
| 1 02 34 03 | Penyusunan Perencanaan Dinkes Kota Palu | 110.967.000 | | | | 110.967.000 | | | | 100,00 | | | | (28,89) | | | (28,89) | (28,89) |

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset

ari tabel di atas terlihat bahwa selama kurun waktu Tahun 2016 s/d 2020 terjadi fluktuasi pagu anggaran yang juga berimbas pada berfluktuasinya realisasi anggaran dalam setiap tahunnya. Dengan melihat rasio antara realisasi dan anggaran dalam setiap tahun terjadi penurunan namun bukan berarti dikatakan tidak baik atau kurang baik karena jika dilihat trend capaian serapan tiap tahunnya masih $\geq 85\%$.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pelayanan Kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Palu. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kesehatan di Kota Palu.

Tantangan

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang baik;
2. Dampak globalisasi dan perdagangan bebas menuntut kualitas SDM yang tinggi karena persaingan penyediaan tenaga dan pelayanan kesehatan dari luar negeri;
3. Kebiasaan yang masih melekat erat di masyarakat sehingga belum mendukung secara maksimal perilaku sehat;
4. Terjadinya transisi epidemiologi penyakit mengakibatkan beban ganda dalam penanggulangan masalah kesehatan;
5. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan terdekat di masyarakat masih belum optimal sehingga peran serta masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif terhadap bayi, balita, dan lansia masih rendah;
6. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Peluang

1. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah melalui program-program prioritas di bidang kesehatan;
2. Adanya kegiatan peningkatan akreditasi Puskesmas melalui pendanaan Pusat melalui DAK Kesehatan;
3. Tersedianya institusi pendidikan tenaga kesehatan di Kota Palu sebagai produsen tenaga kesehatan;
4. Tingkat pendidikan yang semakin membaik dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman konsep sehat dan sakit masyarakat;
5. Semakin gencarnya penanganan peningkatan gizi balita yang diharapkan dapat menekan angka prevalensi wasting;
6. Antusias yang tinggi dari masyarakat akan informasi kesehatan melalui media komunikasi cetak dan elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai peluang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masalah-masalah kesehatan;
7. Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mewajibkan Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melaksanakan dan mencapai target dari SPM tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

KOTA PALU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Pembangunan kesehatan di Kota Palu masih menghasilkan berbagai permasalahan dimana isu isu strategis permasalahan tersebut adalah :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kota Palu

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| 1 | Indeks Pelayanan Kesehatan yang bermutu belum mencapai target | Belum maksimalnya pelayanan kesehatan | Penempatan Tenaga kesehatan yang belum merata. |
| | | | Belum memadainya penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan |
| | | | Masih Rendahnya Indeks Keluarga Sehat |
| | | | Minimnya tenaga medis (dokter spesialis) |
| 2. | Derajat kesehatan masih belum mencapai target | Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit | Masih tingginya Angka kematian Ibu, bayi dan balita |
| | | | Masih Tingginya angka <i>Stunting</i> |
| | | | Masih tingginya kasus penyakit menular (TB, HIV dan DBD) dan tidak menular (HT, DM dan ODGJ) |
| | | Meningkatnya kasus covid-19 | |
| | | Penjaminan kesehatan masyarakat miskin belum seluruhnya tercover | Keterbatasan pendanaan penjaminan kesehatan melalui dana APBD |

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kesehatan dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis

| No · | Isu Strategis | | | |
|---------|---|---|--|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional | Lain-lain |
| 1. | <p>Sustainable Development Goals (SDGs) 2030;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan keberhasilan SDGs selama 15 tahun ke depan tidak berbeda jauh dengan MDGs yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. | <p>Upaya akselerasi kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian indikator SDGs</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Primary Health Care</i> yang efektif akan dapat mengatasi meningkatnya beban penyakit tidak menular, kematian dini karena penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat, aktivitas fisik rendah dan diet tidak sehat.. | <p>Penguatan kegiatan yang memberikan daya ungkit kepada pencapaian indikator SDGs;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan akselerasi kegiatan dalam rangka pencapaian indikator SDGs, meliputi: 1) Penurunan Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk; 2) Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita; 3) Pemberian Imunisasi Campak pada Bayi; 4) Penurunan Angka Kematian Ibu; 5) Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan; 6) Penurunan Prevalensi HIV-AIDS; 7) Penurunan Prevalensi Penyakit Malaria; 8) Peningkatan CDR dan Cure Rate penderita TB; 9) Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak; 10) Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak. <p>Belum tercapainya beberapa indikator derajat kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian ibu di Kota Palu masih berfluktuasi tingginya meskipun pernah berada dibawah target nasional dan SDGs. - Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan yang dapat dilihat dengan masih rendahnya angka D/S (parameter Posyandu). - Masih adanya kasus gizi buruk, wasting dan juga stunting di masyarakat - Masih Rendahnya IKS Kota Palu | |
| 2. | <p>Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberlakuan ASEAN Community akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus merupakan tantangan tersendiri terutama berkaitan dengan meningkatnya daya saing dari fasilitas penyedia layanan kesehatan serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. | <p>Upaya peningkatan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya. | <p>Upaya peningkatan mutu layanan dan sumber daya manusia manusia kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan standarisasi pelayanan pada fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan dengan penerapan ISO, GKM, dan akreditasi Puskesmas serta - Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petugas kesehatan secara berkesinambungan. | |

3.2 TELAAHAN TERHADAP VISI MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Visi

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN”

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah Kota Palu. Visi merupakan tujuan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah mengacu pada realitas masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang bercirikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan pembangunan Kota yang melayani dan dinikmati oleh warganya bercirikan harmonis dalam keragaman. Penelaahan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan dalam penjelasan Visi sebagaimana berikut:

Kota Palu

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Mandiri

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan nyaman

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

Profesional

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan berkelanjutan

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan

bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Keagamaan

Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Misi

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional. Empat pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber daya manusia (sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan sdm yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan.

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan**

nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka visi di atas dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut :

MISI I : Membangun Perekonomian yang mandiri dan siap berdaya saing dalam perkembangan ekonomi Regional dan Global.

MISI 2 : Membangun kembali lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan Infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.

MISI 3 : Mengembangkan sumber daya Manusia yang tangguh menghadapi perkembangan Global dan Mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19

MISI 4 : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan hadir melayani.

Misi 1 : Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4: Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

**Mandiri – aman – nyaman – tangguh – profesional –
berkelanjutan – kearifan lokal – keagamaan**

Yang digaungkan dengan

“Palu Mantap Bergerak Palu Mantap Bergerak”

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (*smart city*);
- b. Kota tangguh (*resilience city*);
- c. Kota hijau (*green city*); dan
- d. Kota inklusif (*inclusive city*).

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan telaahan pada visi dan misi kepala daerah, Dinas Kesehatan terkait secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah terutama pada Misi :

- **MISI 3** : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19
- **MISI 4** : Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Palu tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, karena dalam hal ini Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD Teknis bidang kesehatan di Propinsi Sulawesi

Tengah. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di propinsi. Demikian pula untuk kebijakan Propinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Kota Palu diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan ditingkat Pusat dan Propinsi.

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjabaran dari visi dan misi Presiden Republik Indonesia ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***, Kementerian Kesehatan dalam Renstra 2020-2024 menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas fungsinya yang mengacu pada Renstra Kementrian Kesehatan 2020-2024 yaitu :

1. meningkatkan umur harapan hidup,

2. menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
3. menurunkan angka kematian bayi,
4. menurunkan prevalensi stunting pada balita.
5. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
6. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Terkait dengan visi, misi dan program dalam RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yaitu **“Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**, Dinas Kesehatan Propinsi mengacu pada misi ke 5 (lima) RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka target capaian pembangunan kesehatan di Kota Palu adalah mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan, melalui pelayanan promotif dan preventif dengan peningkatan akses, cakupan dan mutu pelayanan kesehatan serta penyediaan sumber daya kesehatan yang cukup, merata dan bermutu yang bisa sejajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia.

Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas fungsinya mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu

1. Optimalisasi upaya kesehatan,
2. Sumberdaya manusia kesehatan,
3. Sarana prasarana kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di

atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu 2021-2026 terdapat 5 (lima) isu strategis yaitu:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Dari 5 lima isu strategis yang termuat dalam KLHS, Dinas Kesehatan Kota Palu sesuai tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan pada :

Isu 1 : Pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Isu 2 : Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;

Isu 4 : Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Isu 5 : Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Dari telaahan penataan ruang dan KLHS di atas, faktor-faktor faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat:

- a. Sinkronisasi antara program lintas PD belum optimal;
- b. Koordinasi lintas PD/lintas instansi dalam pelaksanaan tugas belum optimal;
- c. Potensi gejolak dan dampak buruk terhadap masyarakat.

2. Faktor-faktor Pendorong:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

- b. Keterbukaan dan kelancaran informasi melalui sarana teknologi informasi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu - isu pokok dan atau strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Penurunan angka *Stunting*.
3. Masih tingginya angka penyakit menular dan prevalensi tidak menular
4. Penguatan layanan kesehatan
5. Masih Rendahnya Indeks Keluarga Sehat

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Palu memandang perlu untuk melakukan langkah - langkah responsif terhadap isu - isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu periode 2021 - 2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Perumusan tujuan dan sasaran strategis harus memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Walikota selama 5 (lima) tahun periode kepemimpinan.

Dinas Kesehatan Kota Palu telah merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026, demi mencapai Misi ke-3 Pemerintah Daerah yaitu **Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global Dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana Dan Covid – 19**

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dengan sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesehatan”**

Prioritas pembangunan yang sesuai dengan Misi ke-3 terkait dengan pembangunan kesehatan di Kota Palu yaitu :

1. Membangun fasilitas kesehatan yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
3. Mendorong pemerataan kuantitas dan kualitas kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu mengalami perubahan yang mengacu pada Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800/110/Organisasi/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/Organisasi/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – IKU DINAS KESEHATAN
yang mendukung pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN | | | | |
|----|--|--|---|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1. | Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu | | 1 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu | CC | CC | B | B | B |
| | | | | (58) | (59) | (60,50) | (61) | (63) |
| 2 | Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Palu | B | B | B | BB | BB |
| | | | | (65,50) | (66,50) | (67,50) | (68,50) | (69,50) |
| | | | 1 Angka Harapan Hidup | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,2 |
| | | | 2 Case Fatality Rate Covid-19 | 1,75% | 1,5% | 1% | 1% | < 1% |
| | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat | | 1 Indeks pelayanan kesehatan puskesmas | Baik (80) | Baik (81,5) | Baik (83) | Baik (83,5) | Baik (85) |
| | | | 2 Prevalensi balita Stunting | 18% | 16% | 14% | 12% | 10% |
| | Meningkatkan ketangguhan sumber daya manusia | | 3 Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4 Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 4.2
Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN | | | | |
|----|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Derajat Kesehatan | 1 Angka Harapan Hidup | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,2 |
| | | | 2 Prevalensi balita Stunting | 18% | 16% | 14% | 12% | 10% |
| | | | 3 Indeks Keluarga Sehat | 0,436 | 0,439 | 0,442 | 0,445 | 0,448 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD selama 5 tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Strategi yang diambil Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

Adapun arah kebijakan yang diambil untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2016–2021 di Kota Palu dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Memberikan iuran Jaminan dan kualitas kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
5. Meningkatkan penanggulangan stunting
6. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2021-2026

| Visi Walikota Palu : “Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan” | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| MISI 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana dan Covid – 19 | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya derajat kesehatan | <div> <div>✓</div> <div>1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan</div> </div> | <div> <div>✓</div> <div>1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing</div> <div>✓</div> <div>2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan</div> <div>✓</div> <div>3. Memberikan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan rentan</div> <div>✓</div> <div>4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak</div> <div>✓</div> <div>5. Meningkatkan penanggulangan stunting</div> <div>6 Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</div> </div> |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyajian program prioritas disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan yang berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program/kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program/Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan tergolong ke dalam urusan pemerintahan wajib.

Memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Misi, tujuan serta sasaran strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2021-2026 maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara adil dan merata

Sasaran : Terciptanya kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas jangkauan kesehatan yang merata dan bermutu

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan : Meningkatnya profesionalisme Sumber daya Aparatur

Sasaran : Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dan terdistribusi secara merata

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Tujuan : Melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan dan penyalahgunaan obat dan zat terlarang dan juga terlaksananya penyediaan alat kesehatan.

- Sasaran : Terkendalinya penyaluran obat, Napza dan terbebasnya masyarakat dari penyalahgunaan obat dan zat terlarang, serta penyediaan alat kesehatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Masyarakat
- Tujuan : Terwujudnya lingkungan sehat serta peran serta masyarakat dalam mempromosikan lingkungan sehat
- Sasaran : Tercapainya masyarakat sadar lingkungan sehat
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
- Tujuan : Meningkatnya nilai SAKIP OPD
- Sasaran : Terlaksananya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja dan target capaian kinerja yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Tabel 6.1

| Tujuan | Saasan | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|------|--------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | Target | | Rp. |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan | Meningkatkan Derajat Kesehatan | 1 02 | KESEHATAN | | | | 163,413,412,794 | | 163,120,627,708 | | 157,906,226,487 | | 169,188,405,722 | 170,863,080,179 | 824,491,752,890 | DINAS KESEHATAN | | | | |
| | | 1 02 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sukup OPD | B | B | 94,385,700,936 | B | 96,166,498,078 | B | 94,662,498,821 | BB | 98,170,799,601 | 97,542,504,953 | 480,928,002,389 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Dok | 12 Dok | 204,626,800 | 12 Dok | 214,858,140 | 12 Dok | 225,601,047 | 12 Dok | 236,881,099 | 260,569,209 | 1,142,536,296 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen (Renja, Renstra) | 1 dokumen (Renja) | 22,867,500 | 1 dokumen (Renja) | 24,010,875 | 2 dokumen (Renja, Renstra, Perubahan) | 25,211,419 | 1 dokumen (Renja) | 26,471,990 | 29,119,189 | 127,680,972 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen (RKA) | 2 dokumen (RKA, DPA) | 78,985,000 | 2 dokumen (RKA, DPA) | 82,934,250 | 2 dokumen (RKA, DPA) | 87,080,963 | 2 dokumen (RKA, DPA) | 91,435,011 | 100,578,512 | 441,013,735 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen (RKA) | 2 dokumen (RKA, DPA) | 22,687,500 | 2 dokumen (RKA, DPA) | 23,821,875 | 2 dokumen (RKA, DPA) | 25,012,969 | 2 dokumen (RKA, DPA) | 26,263,617 | 28,889,979 | 126,675,940 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersusunnya DPA-SKPD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 dokumen (LAKIP, LAKIP, LKRI, TEPPA, DAK FISIK) | 5 dokumen (LAKIP, LAKIP, LKRI, TEPPA, DAK FISIK) | 31,269,300 | 5 dokumen (LAKIP, LAKIP, LKRI, TEPPA, DAK FISIK) | 32,832,765 | 5 dokumen (LAKIP, LAKIP, LKRI, TEPPA, DAK FISIK) | 34,474,403 | 5 dokumen (LAKIP, LAKIP, LKRI, TEPPA, DAK FISIK) | 36,198,123 | 39,817,936 | 174,592,527 | | | | | |
| | | 1 02 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya evaluasi Kinerja Program SPM bid Kesehatan dan pertemuan Dinas-Puskesmas | 2 dokumen (lap.SPM, Laporan tahunan), 3 pertemuan | 2 dokumen (lap.SPM, Laporan tahunan), 3 pertemuan | 48,817,500 | 2 dokumen (lap.SPM, Laporan tahunan), 3 pertemuan | 51,258,375 | 2 dokumen (lap.SPM, Laporan tahunan), 3 pertemuan | 53,821,294 | 2 dokumen (lap.SPM, Laporan tahunan), 3 pertemuan | 56,512,358 | 62,163,594 | 272,573,121 | | | | | |
| 1 02 01 1.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 100% | 86,179,927,140 | 100% | 87,904,319,795 | 100% | 87,905,709,491 | 100% | 87,907,168,672 | 100% | 87,908,700,811 | 437,805,825,909 | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan Tunjangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 86,153,456,740 | 12 Bulan | 87,876,525,875 | 12 Bulan | 87,876,525,875 | 12 Bulan | 87,876,525,875 | 12 Bulan | 87,876,525,875 | 437,659,560,239 | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terwujudnya tata Kelola Keuangan yang transparan dan Akuntabel | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,050,200 | 12 Bulan | 1,102,710 | 12 Bulan | 1,157,846 | 12 Bulan | 1,215,738 | 12 Bulan | 1,276,525 | 5,803,018 | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengendalian keuangan SKPD | Terlaksananya verifikasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Penyusunan Dokumentasi laporan keuangan | 1 dokumen (laporan keuangan) | 1 dokumen (laporan keuangan) | 6,725,500 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 7,061,775 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 7,414,864 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 7,785,607 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 8,174,887 | 37,162,633 | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun OPD | 1 dokumen (laporan keuangan) | 1 dokumen (laporan keuangan) | 3,331,000 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 3,497,850 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 3,672,428 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 3,856,049 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 4,048,851 | 18,405,878 | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 06 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Penyusunan Dokumentasi bahan tanggapan pemeriksaan | 1 dokumen (laporan keuangan) | 1 dokumen (laporan keuangan) | 2,678,700 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 2,812,635 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 2,953,267 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 3,100,930 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 3,255,977 | 14,801,508 | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Terlaksananya hasil laporan keuangan Bulanan / semester wulan / Semesteran SKPD | 4 triwulan pelaporan | 4 triwulan pelaporan | 5,225,000 | 4 triwulan pelaporan | 5,486,250 | 4 triwulan pelaporan | 5,760,563 | 4 triwulan pelaporan | 6,048,591 | 4 triwulan pelaporan | 6,351,020 | 28,871,423 | | | | | | |
| 1 02 01 1.02 08 | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dokumen (laporan keuangan) | 1 dokumen (laporan keuangan) | 7,460,000 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 7,833,000 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 8,224,650 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 8,635,883 | 1 dokumen (laporan keuangan) | 9,067,677 | 41,221,209 | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Penangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|--------|---------|-----------------|--|--|--|--|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|--|--|-----|-----------------------------------|--------|-----|--|
| | | | | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | | Tahun 2026 | | | Target | Rp. | |
| | | | | | | Target | Rp. | | Target | Rp. | | Target | Rp. | | Target | Rp. | | Target | Rp. | | | | |
| | | 1 02 01 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 Tahun | 3.570.000 | 100% | 3.748.500 | 100% | 3.935.925 | 4.132.721 | 4.339.357 | 100% | 4.339.357 | 19.726.504 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.03 01 | Pengadaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.03 02 | Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya penggunaan barang milik daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.03 03 | Koordinasi dan Penilaian Barung Milik Daerah SKPD | Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.03 04 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barung Milik Daerah | Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian barung milik pada SKPD (Monitoring Asset) | 1 tahun | 1 Tahun | 3.570.000 | 1 Tahun | 3.748.500 | 1 Tahun | 3.935.925 | 4.132.721 | 4.339.357 | 1 Tahun | 4.339.357 | 19.726.504 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 | Administrasi Kewagawaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kewagawaan Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 Tahun | 37.182.500 | 1 Tahun | 39.041.940 | 1 Tahun | 40.994.037 | 43.043.739 | 985.195.926 | 1 Tahun | 985.195.926 | 1.145.458.442 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Terperuhnya sarana dan prasarana disiplin pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut pegawai | Terperuhnya pakaian dinas beserta atribut pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 03 | Pendataan dan Administrasi Kewagawaan | Terlaksananya pendataan dan administrasi kewagawaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kewagawaan | Terlaksananya koordinasi Sistem Informasi Kewagawaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 tahun | 1 Tahun | 37.182.800 | 1 Tahun | 39.041.940 | 1 Tahun | 40.994.037 | 43.043.739 | 45.195.926 | 1 Tahun | 45.195.926 | 205.458.442 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | Terlaksananya peningkatan SDM pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terperuhnya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 1 Tahun | 500.245.500 | 100% | 525.257.775 | 100% | 551.520.664 | 579.096.697 | 608.051.532 | 100% | 608.051.532 | 2.764.172.167 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Terperuhnya Penyediaan Komponen Instalasi | 25 item | 6 item | 5.262.000 | 6 item | 5.525.100 | 7 item | 5.801.355 | 6.091.423 | 6.395.994 | 9 item | 6.395.994 | 29.075.872 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terperuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan | 1 dinas | 1 dinas | 7.199.500 | 1 dinas | 7.559.475 | 1 dinas | 7.937.449 | 8.334.321 | 8.751.037 | 1 dinas | 8.751.037 | 39.781.782 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terperuhnya kebutuhan peralatan dan rumah tangga | 1 dinas | 1 dinas | 22.588.500 | 1 dinas | 23.717.925 | 1 dinas | 24.903.821 | 26.149.012 | 27.456.463 | 1 dinas | 27.456.463 | 124.815.721 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik | Terperuhnya kebutuhan Bahan Logistik | 1 tahun | 1 tahun | 11.900.000 | 1 tahun | 12.495.000 | 1 tahun | 13.119.750 | 13.775.738 | 14.464.524 | 1 tahun | 14.464.524 | 65.755.012 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 05 | Penyediaan Bawang Cetakan dan Penggandum | Terperuhnya kebutuhan barang cetakan dan penggandum | 1 paket | 1 paket | 54.244.000 | 1 paket | 56.956.200 | 1 paket | 59.804.010 | 62.794.211 | 65.933.921 | 1 paket | 65.933.921 | 299.732.342 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terperuhnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 6 media, 12 kali jasa media | 6 media, 12 kali jasa media | 6.400.000 | 6 media, 12 kali jasa media | 6.720.000 | 6 media, 12 kali jasa media | 7.056.000 | 7.408.800 | 7.779.240 | 6 media, 12 kali jasa media | 7.779.240 | 35.364.040 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Terperuhnya kebutuhan Bahan/Material | 1 tahun | 1 tahun | 79.344.500 | 1 tahun | 83.311.725 | 1 tahun | 87.477.311 | 91.851.177 | 96.443.736 | 1 tahun | 96.443.736 | 438.428.449 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 08 | fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 tahun | 1 tahun | 3.000.000 | 1 tahun | 3.150.000 | 1 tahun | 3.307.500 | 3.472.875 | 3.646.519 | 1 tahun | 3.646.519 | 16.576.894 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi berdasarkan surat tugas dan surat perintah | 37 OK | 37 OK | 310.307.000 | 37 OK | 325.822.350 | 37 OK | 342.113.468 | 359.219.141 | 37 OK | 37 OK | 377.180.098 | 1.714.642.056 | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya penatausahaan arsip SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Saaran | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RP-JMD (Target Tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--------|--------|-----------------|--|--|---|--|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
| | | 1 02 01 1 09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 01 1 09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Terperluhanya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat | 100% | | 66,404,755,308 | | 64,209,416,919 | | 60,592,444,524 | | 68,359,760,923 | | 69,793,050,944 | | 329,359,428,618 | |
| | | 1 02 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan | Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP | 14 Puskesmas | 14 | 19,382,035,275 | 14 Puskesmas | 17,349,766,221 | 14 Puskesmas | 16,284,040,712 | 14 Puskesmas | 21,445,883,616 | 14 Puskesmas | 21,470,695,761 | 14 Puskesmas | 95,932,421,586 | |
| | | 1 02 2.01 02 | Pembangunan Puskesmas | Terlaksananya pembangunan Puskesmas | | 1 Pkm | 507,412,500 | 1 Pkm | | 1 Pkm | 495,000,000 | | | | | 2 Pkm | 1,002,412,500 | |
| | | 1 02 2.01 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terwujudnya fasilitas kesehatan lainnya | | | | 1 Paket | 400,000,000 | | | | | | | 1 paket | 400,000,000 | |
| | | 1 02 2.01 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Pembangunan Rumah Dinas di Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 2.01 06 | Pengembangan Puskesmas | Pengembangan Puskesmas menjadi klinik modern | | 4 Pkm (Sangurua, Pantoloan, Bulili, Nosa rata) | | 3 Pkm | | 2 Pkm | | | | 5 Pkm | 6,000,000,000 | 14 Puskesmas | 6,000,000,000 | |
| | | 1 02 2.01 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | 3 Pkm (Pantoloan, Bulili, Nosa rata) | | 3 Pkm | | 3 Pkm | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 1 02 2.01 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | 1 Pkm (Buluri) | 385,000,000 | | | 1 Pkm (Dj Kodj) | 385,000,000 | | | 3 Pkm | | 4 Puskesmas | 770,000,000 | |
| | | 1 02 2.01 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, Puskesmas, Polindes | | | | | | | | | | 3 Pkm | | | | |
| | | 1 02 2.01 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Rehabilitasi dan Pemeliharaan | | | | 3 Runding | 1,050,000,000 | | | | 0 | | 0 | 3 Runding | 1,050,000,000 | |
| | | 1 02 2.01 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya Pengadaan Mesin Kesehatan, Printer, AC dan Sarana pendukung lainnya pada fasilitas kesehatan | | Kulkas 4 Unit | 10,719,000 | 14 Komputer, 14 Printer | 259,000,000 | 14 AC | 112,000,000 | | | | | 14 Puskesmas | 381,719,000 | |
| | | 1 02 2.01 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan PAL dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan | | 4 Pkm (Pantoloan, Nosarara, Bulili, Lere) | 4,330,000,000 | 1 Pkm | 650,000,000 | | | | | | | | 4,980,000,000 | |
| | | 1 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1 paket | 1 paket | | 1 paket | 422,578,707 | 1 paket | 283,605,273 | 1 paket | 97,610,500 | 1 paket | | 1 paket | 803,794,480 | |
| | | 1 02 2.01 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 1 paket | 1 paket | 176,000,000 | 1 paket | 176,000,000 | 1 paket | 176,000,000 | 1 paket | 176,000,000 | 1 paket | 176,000,000 | 1 paket | 880,000,000 | |
| | | 1 02 2.01 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Tersevidnya obat untuk masyarakat kota Palu | 1 paket | 1 paket | 8,385,674,775 | 1 paket | 8,804,958,514 | 1 paket | 9,245,206,439 | 1 paket | 9,245,206,439 | 1 paket | 9,707,466,761 | 1 paket | 45,388,512,929 | |
| | | 1 02 2.01 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah bahan medis habis pakai yang diadkan | 14 Puskesmas | 14 | 5,587,229,000 | 14 Puskesmas | 5,587,229,000 | 14 | 5,587,229,000 | 14 | 5,587,229,000 | 14 | 5,587,229,000 | 14 | 27,936,145,000 | |
| | | 1 02 2.01 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Tujuan | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Penangktan Daerah Penanggung Jawab | | |
|--------|---------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|---------------------------|---|-------------|---|------------------------------------|---------------|-----|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | Target | Rp. |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 02 2.02 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Perserta Layanan Kesehatan Rujukan yang Sesuai Standar | 10 RS | 10 RS | 55.112.500 | 10 RS | 57.868.125 | 10 RS | 60.761.531 | 10 RS | 63.799.608 | 10 RS | 66.989.588 | 10 RS | 304.531.352 | 19 | |
| | 02 2.02 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Puskesmas | Terlaksananya akreditasi Puskesmas | 2 | 2 | 403.036.533 | Puskesmas | 403.036.533 | 2 | 403.036.533 | Puskesmas | 403.036.533 | 2 | 403.036.533 | Puskesmas | 2.328.990.882 | DAK ROW FISIK | |
| | 02 2.02 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Buruk) Inisiasi dan Pemberian Obat Masal | Kejadian Ikutan Buruk Pasca Inisiasi dan Pemberian Obat Masal | 7.500 siswa | 7.500 siswa | 10.725.000 | 8.250 siswa | 11.261.250 | 7.500 siswa | 11.824.313 | 7.500 siswa | 12.415.528 | 7.500 siswa | 13.036.305 | 7.500 siswa | 59.262.395 | | |
| | 02 2.02 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 02 2.02 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Tersedianya Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 02 2.03 | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota | Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 88.254.550 | | 214.071.988 | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 202.831.637 | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 82.939.874 | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 163.425.188 | 1 Dinas, 14 Puskesmas | 751.523.236 | | |
| | 02 2.03 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Terlaksananya Penyusunan Profil Kesehatan sebagai pendukung sistem informasi bidang kesehatan | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap | 48.524.750 | | 50.950.988 | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap | 53.498.537 | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap | 56.173.464 | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap | 58.982.137 | 1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap | 268.129.875 | | |
| | 02 2.03 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Peningkatan jaringan sistem informasi kesehatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 20.110.000 | | 22.121.000 | 12 Bulan | 24.333.100 | 12 Bulan | 26.766.410 | 12 Bulan | 29.443.051 | 12 Bulan | 122.773.561 | | |
| | 02 2.03 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Tersedianya perangkat sistem informasi yang mendukung penguatan sistem informasi kesehatan | 1 Laptop LCD | 1 Laptop LCD | 19.619.800 | | 141.000.000 | Perangkat Komputer & Jaringan | 125.000.000 | | Maintenance peralatan SIK | 75.000.000 | 1 Dinas | 360.619.800 | | | |
| | 02 2.04 | Penerbitan Izin RS Kelas C dan D serta Fasilitas Tugkat daerah Kab/Kota | Penerbitan izin RS yang dikeluarkan | 10 RS | 13 RS | 88.400.000 | | 92.820.000 | 10 RS | 97.461.000 | 10 RS | 102.334.050 | 10 RS | 107.450.753 | 10 RS | 488.465.803 | | |
| | 02 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah | Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring | 10 RS | 13 RS | 4.025.000 | | 4.226.250 | 10 RS | 4.437.563 | 10 RS | 4.659.441 | 10 RS | 4.892.413 | 10 RS | 22.240.666 | | |
| | 02 2.04 02 | Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah | Meningkatkan pengetahuan SDM tentang Sistem Rujukan Terintegrasi | 10 RS | 13 RS | 14.625.000 | | 15.356.250 | 10 RS | 16.124.063 | 10 RS | 16.930.266 | 10 RS | 17.776.779 | 10 RS | 80.812.357 | | |
| | 02 2.04 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan | 66 Fasilitas Kesehatan | 66 Fasilitas Kesehatan | 62.850.000 | | 65.992.500 | 66 Fasilitas Kesehatan | 69.292.125 | 66 Fasilitas Kesehatan | 72.756.731 | 66 Fasilitas Kesehatan | 76.394.568 | 66 Fasilitas Kesehatan | 347.285.924 | | |
| | 02 2.04 04 | Penyaji Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Meningkatkan Mutu Pelayanan Rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas | 10 RS, 14 Puskesmas | 10 RS, 14 Puskesmas | 6.900.000 | | 7.245.000 | 10 RS, 14 Puskesmas | 7.607.250 | 10 RS, 14 Puskesmas | 7.987.613 | 10 RS, 14 Puskesmas | 8.386.993 | 10 RS, 14 Puskesmas | 38.126.856 | | |
| | 02 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Terlaksananya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 100% | 100% | 371.292.400 | | 372.016.775 | 100% | 372.777.369 | 100% | 373.575.992 | 100% | 455.699.770 | 100% | 1.945.362.306 | | |
| | 02 03 2.01 | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota | 256 Sarana Praktek | 256 Sarana Praktek | 9.137.500 | | 9.594.375 | 256 Sarana Praktek | 10.074.094 | 256 Sarana Praktek | 10.577.793 | 256 Sarana Praktek | 11.106.688 | 256 Sarana Praktek Swasta | 50.490.456 | | |
| | 02 03 2.01 01 | Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RP/MD (Target Tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---------------|--------------------|--|--|--|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan | Sarana Praktek Swasta | 9,137,500 | Sarana Praktek Swasta | 9,594,375 | Sarana Praktek Swasta | 10,074,094 | Sarana Praktek Swasta | 10,577,798 | Sarana Praktek Swasta | 11,106,688 | Sarana Praktek Swasta | 50,490,456 | DAK NON FISIK (BPOM) |
| | 02 | 03 | 2.02 | 01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 14 Puskesmas , 13 RS | 5,350,000 | 14 Puskesmas, 13 RS | 5,617,500 | 14 Puskesmas, 13 RS | 5,898,375 | 14 Puskesmas, 13 RS | 6,193,294 | 14 Puskesmas, 13 RS | 47,788,181 | 14 Puskesmas, 13 RS | 70,847,350 | |
| | 02 | 03 | 2.02 | 01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemerluhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 | 03 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 14 Puskesmas , 13 RS | 5,350,000 | 14 Puskesmas, 13 RS | 5,617,500 | 14 Puskesmas, 13 RS | 5,898,375 | 14 Puskesmas, 13 RS | 6,193,294 | 14 Puskesmas, 13 RS | 47,788,181 | 14 Puskesmas, 13 RS | 70,847,350 | |
| | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 396,804,900 | 500 nakes | 1,824,024,500 | |
| | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 356,804,900 | 100 nakes | 396,804,900 | 500 nakes | 1,824,024,500 | |
| | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN & MAKANAN MINUMAN | 1 Tahun | 616,311,000 | 1 Tahun | 717,198,350 | 1 Tahun | 618,174,435 | 1 Tahun | 619,248,129 | 1 Tahun | 950,429,191 | 1 Tahun | 3,521,361,105 | |
| | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, T.Obat, T. Alkes dan Optikal, Usaha mikro obat tradisional (UMOT) | 256 apotek, 25 toko obat, 33 batra | 232,645,500 | 258 apotek, 30 toko obat, 38 batra | 232,645,500 | 260 apotek, 32 toko obat, 40 batra | 232,645,500 | 262 apotek, 34 toko obat, 42 batra | 232,645,500 | 264 apotek, 36 toko obat, 44 batra | 362,645,500 | 266 apotek, 38 toko obat, 46 batra | 1,293,227,500 | |
| | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Mikro Obat Tradisional dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 256 apotek, 25 toko obat, 33 batra | 232,645,500 | 258 apotek, 30 toko obat, 38 batra | 232,645,500 | 260 apotek, 32 toko obat, 40 batra | 232,645,500 | 262 apotek, 34 toko obat, 42 batra | 232,645,500 | 264 apotek, 36 toko obat, 44 batra | 362,645,500 | 266 apotek, 38 toko obat, 46 batra | 1,293,227,500 | |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindakan Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Mikro Obat Tradisional dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindakan Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Mikro Obat Tradisional dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 02 | 04 | 2.02 | | Pemberian Sertifikat Produk untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perumahan Rumah Tangga | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|--|---|--|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--|-----|-----------------------------------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | | |
| | | 1 02 04 2.02 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikasi Produksi Alkes kelas I Tertentu dan PKRT kelas I Tertentu dan Perusahaan Rumah Tangga. | Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 02 04 2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga | Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT | 235 PIRT | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 240,869,500 | 265 PIRT | 804,347,500 | DAK NON FSUK (BROM) | | |
| | | 1 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, , untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah | Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan | 235 PIRT | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 140,869,500 | 265 PIRT | 240,869,500 | 265 PIRT | 804,347,500 | DAK NON FSUK (BROM) | | |
| | | 1 02 04 2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higien sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM | 1.225 TPM | 1.225 TPM | 3,573,500 | 1.348 TPM | 3,930,850 | 1.225 TPM | 4,323,935 | 1.225 TPM | 4,756,329 | 1.225 TPM | 5,231,961 | 1.225 TPM | 21,816,575 | | | |
| | | 1 02 04 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higien sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restaurant dan Depot Air Minum (DAM) | Tertibnya penerbitan stiker | 1.500 stiker | 1.500 stiker | 5,300,000 | 1.600 stiker | 5,830,000 | 1.650 stiker | 6,413,000 | 1.700 stiker | 7,054,300 | 1.750 stiker | 7,759,730 | 1.500 stiker | 32,357,030 | | | |
| | | 1 02 04 2.05 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Tertibnya penerbitan stiker | 1.500 stiker | 1.500 stiker | 5,300,000 | 1.600 stiker | 5,830,000 | 1.650 stiker | 6,413,000 | 1.700 stiker | 7,054,300 | 1.750 stiker | 7,759,730 | 1.500 stiker | 32,357,030 | | | |
| | | 1 02 04 2.06 | Pemeriksaan dan Undak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga | Tertibnya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT | | 135 sarana PIRT | 233,922,500 | 135 sarana PIRT | 333,922,500 | 135 sarana PIRT | 233,922,500 | 135 sarana PIRT | 233,922,500 | 135 sarana PIRT | 333,922,500 | 135 sarana PIRT | 1,369,612,500 | DAK NON FSUK (BROM) | | |
| | | 1 02 04 2.06 01 | Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan | Tertibnya pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT dan Pengawasan serta Tindak Lanjut | | 135 sarana PIRT | 74,009,000 | 135 sarana PIRT | 74,009,000 | 135 sarana PIRT | 74,009,000 | 135 sarana PIRT | 74,009,000 | 135 sarana PIRT | 74,009,000 | 135 sarana PIRT | 370,045,000 | DAK NON FSUK (BROM) | | |
| | | 1 02 04 2.06 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga | Terpenuhi Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan IRT | | 135 sarana PIRT | 159,913,500 | 135 sarana PIRT | 259,913,500 | 135 sarana PIRT | 159,913,500 | 135 sarana PIRT | 159,913,500 | 135 sarana PIRT | 259,913,500 | 135 sarana PIRT | 999,567,500 | DAK NON FSUK (BROM) | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
|--------|---------|---------------|---|---|--|--|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--|-----|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. |
| 11 | 121 | 131 | 64 | 151 | 61 | 70 | 1,635,353,150 | 100% | 1,655,497,585 | 100% | 1,660,331,338 | 100% | 1,665,021,078 | 100% | 2,121,395,321 | 100% | 8,737,598,472 | 118 | |
| | | 01 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Terlaksananya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100% | | | 100% | 9,738,750 | 100% | 10,225,688 | 100% | 10,736,972 | 100% | 11,273,820 | 100% | 51,250,230 | | |
| | | 05 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota | Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah kebijakan, dunia usaha/Swasta/LSM yang memanfaatkan Sumber dayanya untuk mendukung kesehatan | 2 Kebijakan | 14 Puskesmas | 9,275,000 | 2 Kebijakan | 9,738,750 | 2 Kebijakan | 10,225,688 | 2 Kebijakan | 10,736,972 | 2 Kebijakan | 11,273,820 | 2 Kebijakan | 51,250,230 | | |
| | | 05 | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota | Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS | 100% | 100% | 7,874,400 | 100% | 27,555,085 | 100% | 31,901,901 | 100% | 36,080,356 | 100% | 75,000,000 | 100% | 178,411,742 | | |
| | | 01 | Penyenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Pelaksanaan kegiatan Hidup Bersih dan Sehat | 46 Kelurahan | 28 Sekolah | 7,874,400 | 46 Kelurahan | 27,555,085 | 46 Kelurahan | 31,901,901 | 46 Kelurahan | 36,080,356 | 46 Kelurahan | 75,000,000 | 46 Kelurahan | 178,411,742 | | |
| | | 05 | Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota | Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM | 100% | 100% | 1,618,203,750 | 100% | 1,618,203,750 | 100% | 1,618,203,750 | 100% | 1,618,203,750 | 100% | 2,035,121,501 | 100% | 8,507,936,501 | | |
| | | 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan | 224 Posyandu, 50 Poskesdes | 226 Posyandu, 50 Poskesdes | 1,618,203,750 | 226 Posyandu, 50 Poskesdes | 1,618,203,750 | 226 Posyandu, 50 Poskesdes | 1,618,203,750 | 226 Posyandu, 50 Poskesdes | 1,618,203,750 | 230 Posyandu, 50 Poskesdes | 2,035,121,501 | 226 Posyandu, 50 Poskesdes | 8,507,936,501 | | |

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu periode Tahun 2021–2026 menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode Tahun 2021–2026. Dengan demikian indikator capaian pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD menjadi dasar bagi setiap PD dalam mencapai indikator sasaran program/kegiatan.

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ditetapkan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian RPJMD | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | |
| 1 | Angka harapan hidup | 71,04 | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,2 | 72,2 |
| 2 | Prevalensi balita gizi buruk (%) | 0.216 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | |
| | Pelayanan Urusan Wajib - Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| | Kesehatan | | | | | | | |
| 1 | Angka kelangsungan hidup bayi | 0.9980 | 0.9980 | 0.9975 | 0.9972 | 0.9968 | 0.9965 | 0.9965 |
| | Angka kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup | 2.01 | 12.00 | 11.60 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2 | Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup | 2.01 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup | 2.01 | 12.20 | 11.60 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup | 81.30 | 182.25 | 180.31 | 178.94 | 177.64 | 175.59 | 175.59 |
| 5 | Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk) | 3.77 | 3.78 | 3.79 | 3.79 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 6 | Rasio Dokter per (1:2500 penduduk) | 59 | 59.33 | 60.33 | 61.33 | 62.33 | 63.33 | 63.33 |
| 7 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 106.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal 2020 | Target Capaian RPJMD | | | | | Kondisi Akhir 2026 |
|-----|--|-------------------|----------------------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 9 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 95.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | AFP rate (/ 100.000 pddk <15 th) | 0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | 98.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Penderita Diare yang ditangani | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | 95.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Cakupan kunjungan bayi | 100.96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 88.79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | 98.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100.30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 108.54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita | 76.21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian RPJMD | | | | | Kondisi Akhir 2026 |
|-----|---|---|----------------------|------|------|------|------|--------------------|
| | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 23 | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 76.21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 32.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 25.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 80.21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 19.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 26.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan | 87.41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 37.81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 101.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian RPJMD | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | Indikator Kinerja Utama | | | | | | | |
| 1 | Prevalensi balita Stunting | 14.9 | 18% | 16% | 14% | 12% | 10% | 10% |
| 2 | Indeks Keluarga Sehat | 0.24 | 0.436 | 0.439 | 0.442 | 0.445 | 0.448 | 0.448 |

BAB VIII


P E N U T U P

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi, serta indikator kinerja program/kegiatan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Palu selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Renstra yang telah disusun ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dalam bidang kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh aparat dan instansi terkait, termasuk para tenaga kesehatan, dengan mengikutsertakan secara langsung peran aktif pihak swasta dan masyarakat.

Demikian Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kesehatan di Kota Palu.

Palu, 10 Maret 2023


**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Palu**
dr. Rochmat Jasin Moenawar
Nip. 19691203 200604 1 008



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS KESEHATAN KOTA PALU
Jalan Balai Kota Utara No. 4 Palu
Telp/Fax (0451) 457080-457079

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR : 050/135a.III/DISKES/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (REVISI)
DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah Pasal 11 ayat 3.a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan Kota Palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Revisi) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kota Palu No 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Revisi) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Kesehatan Kota Palu ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan evaluasi target dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021;
- b. mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026;
- c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- e. menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Revisi) dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Strategis (Revisi) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palu
pada tanggal : 1 Maret 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



dr. Rochmat Jasin Moenawar
Pembina Tingkat. I
NIP. 19691203 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR
:050/135a.III/DISKES/2023
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (REVISI) DINAS
KESEHATAN KOTA PALU TAHUN
2021-2026

1. Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu
3. Sekretaris : Sub. Koordinator subag Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kota Palu
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 3. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 5. Sub. Koordinator subag Keuangan dan Aset
 6. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
 7. Sub. Koordinator Seksi Kesehatan Keluarga
 8. Sub. Koordinator Seksi Gizi
 9. Sub. Koordinator Seksi Promosi Kesehatan
 10. Sub. Koordinator Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 11. Sub. Koordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi
 12. Sub. Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 13. Sub. Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan
 14. Sub. Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 15. Sub. Koordinator Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan
 16. Sub. Koordinator Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman
 17. Sub. Koordinator Seksi Sarana dan Alat Kesehatan
 18. Sub. Koordinator Seksi Hukum dan SDM Kesehatan
 19. Staf Subbag Perencanaan Program

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



dr. Rochmat Jasin Moenawar
Pembina Tingkat. I
NIP. 19691203 200604 1 008



PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS KESEHATAN

JL. BALAI KOTA UTARA No. 4 ☎ (0451) 425140 PALU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU **NOMOR : 903/247a.III/Diskes/2023**

TENTANG **PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** **DINAS KESEHATAN KOTA PALU** **TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventari Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu No 4).
12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);
13. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800/110/Organisasi/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800/116/Organisasi/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2021 - 2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.

KEDUA : Dinas Kesehatan Kota Palu wajib:

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Palu

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Maret 2023


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**
dr. ROCHMAT JASIN MOENAWAR
NIP. 19691203 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR : 903/247a.III/Diskes/2023
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
KESEHATAN KOTA PALU TAHUN
2021-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya Derajat Kesehatan | Angka Harapan Hidup | AHH dihitung dari hasil Sensus & Survey (perhitungan BPS) |
| | | Prevalensi Balita Stunting | Jumlah kasus stunting yang terjadi / Jumlah Balita yang ditimbang/diukur di suatu wilayah pada periode waktu yang sama x 100% |
| | | Indeks Keluarga Sehat | <table><tr><td>Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,800</td></tr><tr><td>Jumlah seluruh keluarga</td></tr></table> |
| Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,800 | | | |
| Jumlah seluruh keluarga | | | |



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU



dr. ROCHMAT JASIN MOENAWAR
NP. 19691203 200604 1 008